

SKRIPSI

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENCEGAH
TERJADINYA ABRASI PANTAI DI DESA NUMANA
KABUPATEN WAKATOBI**

Disusun Oleh:

Halim Jauchari Alimin

Nomor Stanbuk 105641104616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENCEGAH
TERJADINYA ABRASI PANTAI DI DESA NUMANA
KABUPATEN WAKATOBI**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Ilmu

Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Halim Jauhari Alimin

Nomor Stambuk : 105641104616

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

05/02/2022

1 cap
Smb. Alimin

12/0029/1PM/22 GP
AL1
P

HALAM PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Proses *Collaborative Governance* Dalam Mencegah
Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana
Kabupaten Wakatobi

Nama Mahasiswa : Halim Jauhari Alimin

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan
Fakultas Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 03/FSP/A.4-II/1/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang di laksanakan di Makassar pada hari Selasa, 11 Januari 2021.



1. Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd

3. Nur Khaerah, S. IP.,M. IP

PERNYATAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halim Jauhari Alimin

Nomor Stambuk : 105641104616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Proses *Collaborative Governance* Dalam Mencegah
Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana
Kabupaten Wakatobi.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau buat oleh orang lain, maka gelar yang di peroleh Skripsi ini karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Halim Jauhari Alimin

ABSTRAK

Halim Jauhari Alimin, Amir Muhiddin dan Rudi Hardi : Proses *Collaborative Governance* dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses *Collaborative Governance* dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi. Metode penelitian ini digunakan adalah kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, kemudian menggunakan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses *Collaborative Governance* dalam mencegah terjadinya abrasi di Desa Numana Kabupaten Wakatobi, yaitu : *Face to Face* atau dialog tata muka berupa berdiskusi dan sosialisasi mengenai cara mencegah terjadinya abrasi pantai dan dihadiri pemerintah dan masyarakat. Membangun kepercayaan (*Trust Building*) meliputi menanam 1000 pohon bakau/ *mangrove* yang melibatkan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat. Komitmen terhadap proses (*Comitmen to Process*) berupa memberikan pelayanan siap siaga dan memberikan motivasi yang kuat dalam berpartisipasi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Pemahaman bersama (*Sharhed Understanding*) berupa sikap memahami tugas masing-masing akan keterbatasan sehingga kolaborasi berjalan dengan baik, dan Pencapaian hasil (*Intermediate Outcome*) berupa pemanfaatan sumberdaya alam.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Abrasi Pantai

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pauji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Proses Collaborative Governance Dalam Pencegahan Abrasi Pantai di Desa Numaha Kabupaten Wakatobi*".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat kepada yang terhormat ayahanda **Dr. H. Anur Muhiddin, M.Si** selaku pembimbing I dan ayahanda **Rudi Hardi, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan banyak-banyak rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ku tercinta dan terkasih Ayah handa **Alimin, B. Spd (Alm)** dan Ibunda **ST. Jawiah** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan 7 anak sekaligus itu tidaklah mudah, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, dan tak lupa kasih sayang yang tak henti-

hentinya kepada ibundaku sampai saat ini yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan memotivasi serta bantuan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada penulis bisa menjadi bekal, serta kebaikan dan cahaya penerang di kelak nantinya, Aamiin.

Terima kasih juga kepada saudara(i) saya Wiwik Suriani Alimin kakak tertua saya, Abdul Hakim Alimin kakak kedua penulis, Muh. Hikmah Alimin kakak ketiga penulis, Chairul Hamka Alimin kakak ke empat penulis, Wilda Alfiani Alimin kakak ke lima penulis dan terakhir Khaliq Aulia Alimin adek bungsu dari 7 bersaudara, yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan sampai saat ini.

Dan tak lupa juga penulis mengucapkan rasa syukur terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya terkhususnya Narasumber yang telah responsive membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

5. Kepada Desa Numana dan jajarannya, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang senangnya meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh di tempat perkuliahan.
7. Keluargaku yang tercinta dan saya banggakan yang dimana telah membantu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang tak sempat saya sebut namanya satu persatu.
8. Teman-teman saya dari IP. B yang saya sudah anggap sebagai saudara(i) meskipun tak sedarah dari semester 1 sampai semester 3
9. Teman-teman saya dari IP. A yang saya sudah anggap sebagai saudara(i) meskipun tak sedarah dari semester 4 sampai semester akhir ini
10. Serta kepada teman-teman angkatan 2016 "FEDERASI" tetaplah selalu dihati.
11. Kepada teman-teman KKP Angkatan XIX Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Faizal, Nawira, Mega, Wanda, Dewi, Lina dan Eva. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman serta pelajaran yang sangat berarti dalam proses pengabdian diri di Desa Pao-pao selama kurang lebih 2 bulan.

12. Teruntu orang tersayang Jusnidar yang selalu memberikan penulis motivasi dan support yang tiada henti-hentinya serta mendoakan agar penulis supaya cepat selesai skripsi sampai wisudah.

13. For my best friends, untuk sohib kampusku yang solid, Hasdiki S.IP, Achmad Fadil Arif S.IP, Halim Jauhari, Riswandi, Asrul salmin, Andi Arhinsa S.IP. Thanks so much atas dukungan, semangat, kebersamaan, kekonyolan, canda dan tawa kalian selama ini. Kalian menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan hidupku.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh sebab itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan kepada para pembaca guna menambah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat, Summa Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraka

Gowa, 4 Agustus 2021



Halim Jauhari Alimin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. <i>Collaborative Governance</i>	12
C. Model Kolaborasi	25
D. Tujuan <i>Collaborative Governance</i>	30
E. Hambatan <i>Collaborative Governance</i>	31
F. Abrasi Pantai	35
G. Kerangka Pikir	43
H. Fokus Penelitian	44
I. Deskripsi Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Informan	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Pengabsahan Data	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Bagaimana Proses <i>Collaborasi Governance</i> dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi	70
C. Pembahasan.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	103
---------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Wakatobi terletak di ujung tenggara Sulawesi. Wilayahnya melingkupi salah satu area di garis terluar Pulau Sulawesi. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3,00 persen dan luas perairan (laut) ± 18.377 km² atau sebesar 97,00 persen dari luas Kabupaten Wakatobi. Atas dasar kondisi tersebut, maka potensi sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata berbasis wisata laut/bahari menjadi sektor andalan daerah Kabupaten Wakatobi. Hal ini diketahui bahwa kabupaten wakatobi dominan lautan dari pada daratan, tidak kemungkinan bahwa akan terjadi abrasi pantai.

Wakatobi adalah kumpulan beberapa pulau yang terdiri dari pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Wakatobi memiliki potensi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan salah satu diantaranya mempunyai terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya hingga sekarang dan biota-biota lautnya banyak dan langka. Wakatobi juga termasuk segitiga karang duni. Masyarakat di desa numana pulau wangi-wangi antusia menjaga ekosistem laut maupun pesisir pantainya dengan Balai Taman Nasional Wakatobi. Maka dari itu apa bila laut dan pesisir pantai tidak di jaga kelestariannya maka akan berdampak pada ekosistem laut dan abrasi

pantai, karna banyak para nelayan dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian pesisir pantai. Untuk itu agar ekosistem laut bisa terjaga maka perlu adanya *collaborative governance*.

Oleh karena itu, kasus yang sering kita jumpai belakangan ini adalah masalah abrasi pantai yang semakin parah akibatnya. Karena abrasi pantai ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Dengan berjalannya zaman, kerusakan lingkungan pantai semakin marak dan bertambah. Sama halnya hutan-hutan mangrove yang dulunya menghiasi pesisir pantai kini telah dibabat habis oleh manusia karena keserakahannya untuk memperkaya diri dengan membangun sarana wisata dan tempat rekreasi, seperti hotel dan sebagainya. Begitupula dengan pasir pantainya yang kerap terjadi pada penambang tanpa izin dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila tidak menjaga kelestarian pantai. Dari total 9,4 juta hektare tanaman mangrove yang ada di Indonesia, sesuai dengan data Departemen Kehutanan RI pada 2006, sekitar 70 persennya rusak.

Maka dari itu kadang air laut tidak pernah diam, air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal, Arsyad (2013). Tetapi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan abrasi

pantai bisa diperkecil dengan cara tetap menjaga kelestarian di sekitar pantai, baik hutan mangrove maupun pasir pantaiya.

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir dan garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak tambak maupun lokasi pemukiman yang di pinggir pantai, serta mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya.

Dampak abrasi pantai menimbulkan banyak permasalahan pada penduduk pesisir, karena pengetahuan tentang abrasi pantai masih sangat terbatas. Karna kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang abrasi pantai mengakibatkan penduduk tidak dapat memprediksi kejadian dan cara adaptasi menghadapi abrasi pantai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan abrasi pantai. Pengetahuan tentang abrasi pantai merupakan hal yang paling utama bagi penduduk pesisir dalam menentukan bentuk adaptasi yang dilakukan dalam pengurangan dampak risiko bencana abrasi pantai.

Abrasi diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia, dan yang paling berpengaruh terhadap kerusakan pantai adalah faktor manusia. Penyebab terjadinya abrasi di pantai sebagian besar (diperkirakan lebih dari 90%) diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia A. Hakam,dkk (2013). Sedangkan Faktor alam berjalan secara alami dan tidak akan terlalu membuat banyak kerusakan jika saja tidak ada campur tangan manusia dalam aktifitasnya.

Seringkali manusia melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, namun ternyata tindakannya tersebut dapat berakibat pada perubahan ekosistem pantai. Misalnya menebang mangrove untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan bangunan, penambangan pasir yang terus menerus, membuat sumur-sumur dipesisir untuk keperluan industri secara berlebihan, dan lain-lain. Manusia terlalu egois dalam memanfaatkan ekosistem pantai, hanya bisa mengambil tanpa bisa memberi. Meninggalkan kerusakan-kerusakan tanpa mau memperbaikinya. Manusia belum sadar bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka akan berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik sekarang maupun yang akan datang.

Agar dampak abrasi tidak semakin meluas, maka harus segera dilakukan penanganan dengan mengacu pada penataan ruang wilayah pesisir. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain : pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (*tempat tinggal*), tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat asuhan dan pembesaran (*nursery ground*), tempat pemijakan (*spawning ground*) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro, sedangkan fungsi ekonomis keperluan industri, dan penghasil bibit.

Pada dasarnya, dimanapun tempat kita hidup dipermukaan bumi ini berpotensi terhadap terjadinya bencana, akan tetapi hal tersebut dapat diantisipasi jika kita mengetahui tentang resiko bencana dan juga jika kita bijak terhadap lingkungan yang kita tinggali. Mengetahui jenis-jenis bencana dan

bagaimana bencana itu terjadi serta tindakan apa yang harus dilakukan sangatlah penting, agar kita terhindari dari kerugian, baik korban jiwa maupun korban harta benda.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi melibatkan stakeholder dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi seperti pengembangan program konservasi hutan *mangrove*, terumbu karang dan pasir pantainya serta pengembangan rencana pengelolaan sampai dalam tahap monitoring. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 38 tahun 2004 tentang pedoman umum pengelolaan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah individu atau kelompok atau unsur masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu wilayah atau sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah.

Sistem kolaborasi telah terjadi antar *stakeholder* seperti perencanaan kawasan konservasi sampai pengelolaan kawasan konservasi. *Stakeholder* terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam yang disebut juga agen, sedangkan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam disebut sebagai pelaku atau aktor seperti masyarakat.

Pemerintah menyadari Taman Nasional Wakatobi tidak hanya dapat dikelola oleh pemerintah saja tetapi dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam melestarikan sumber daya dan lingkungannya sehingga program pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. Salah satu kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* adalah melalui forum komunikasi. Forum komunikasi yang ada di Desa Numana Pulau Wangi-

wangi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjadi selama ini. Akan tetapi ditemukan persamaan dan perbedaan antara pemerintah (agen) dan non pemerintah (aktor) sehingga perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi agen dan aktor yang berada di Kabupaten Wakatobi.

Sranko dalam Sudarmo (2015) mengemukakan bahwa dalam *collaborative governance* terdapat institusi yang mendorong interaksi di antara aktor-aktor organisasi pemerintah dan aktor-aktor organisasi non pemerintah tanpa adanya dominasi dalam mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, dan metode implementasi.

Collaborative Governance dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Haryono, N. (2012). Berbagai kerja sama antar pemangku. Hal ini tentu saja sangat penting bagi peran pemerintah Kabupaten Wakatobi memberikan pengetahuan tentang kelestarian wilayah pesisir kepada masyarakat agar memiliki sudut pandang (mindset) pelestarian mangrove agar terhindar dari abrasi pantai

Pengetahuan dimiliki masyarakat sebelum kerusakan terjadi, agar suatu ekosistem tetap terjaga dalam keasliannya, karena respon serta partisipasi dalam kerjasama antar pemerintah dan swasta memiliki andil besar terhadap terlaksananya pelestarian dan konservasi *mangrove* dan pasir pantai. Dengan respon serta partisipasi masyarakat terhadap konservasi akan berdampak pada penanganan kerusakan yang ada selama dekade terakhir ini.

Kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*.

Dalam kolaborasi pemerintah Kepala Resort Wangi-wangi oleh Bapak Sofian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan pemerintahan Desa Numana dalam menangani permasalahan kerusakan ekosistem terkhususnya bagian lingkungan di pesisir pantai. Hal ini masih kurang efektif dalam pengawasan secara langsung terhadap pemanfaatan SDA yang berlebihan, sehingga kerusakan disekitar yang merasakan dampak buruk dari pencemaran tersebut ialah masyarakat. Dan menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara mengatasi ataupun menanggulangi ketika terjadi abrasi tersebut yang merupakan sesuatu yang sebenarnya harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah dan bahkan menjadi salah satu hal yang juga patut menjadi perhatian bersama.

Dalam sebuah kolaborasi pasti tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sulitnya menentukan waktu yang tepat karena banyaknya *stakeholder* yang terlibat, menjalin komunikasi antar instansi tidaklah mudah, biasanya terjadi permasalahan komunikasi antar unit pelaksanaan program karena komitmen yang tidak sama dalam rapat. Maka dari itu pemilihan aktor juga menjadi hal yang penting didalam proses kolaborasi, mengungkapkan kepentingan aktor serta keterlibatan mereka dalam kolaborasi menjadi salah satu hal penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan, apakah nantinya akan terjadi perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi Proses kolaborasi.

Dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, untuk dapat mengetahui respon dan perilaku masyarakat terhadap penyelamatan atau meminimalisir abrasi pantai di wilayah pesisir Kabupaten Wakatobi, maka penulis akan membuat suatu penelitian dengan judul "*Proses Collaborative Governance dalam Mencegah terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana *Proses Collaborative Governance* dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui seperti apa bentuk Proses *Colaborasi Governance* Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar pemerintah lebih aktif bersosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat baik kalangan atas, menengah, ataupun bawah mengenai pentingnya hutan mangrove bagi alam dan manusia.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan sejenis atau bersangkutan.
- 2) Diharapkan bisa menjadi masukan untuk pemerintah, masyarakat atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan untuk masalah lingkungan khususnya di daerah pesisir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul *Proses Collaborative Governance Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi* adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Sambodo (2016) menemukan bahwa *collaborative governance* dipengaruhi oleh *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership*. Hal ini sebagaimana model yang ditulis oleh Ansell dan Gash (2007). Namun pada pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosoti faktor *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership* serta *Collaborative Process*, juga dipengaruhi oleh faktor budaya yaitu hubungan kekerabatan, arisan, jam karet, musyawarah mufakat, ngaruhke, gotong royong dan swadaya, paternalistic, dan orangnya sekitar itu-itulah saja.

Habibullah (2013), meneliti perbandingan program Kampung Siaga Bencana Dan Desa Tangguh Bencana. Kesimpulan yang diambil adalah Kampung Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Konsep kampung dalam Kampung Siaga Bencana lebih menekankan pada *branding program* dan bukan sebuah konsep kampung sebagai wilayah; sedang pada Desa menekankan pada konsep kewilayahan tentang Desa itu sendiri.

Sedangkan pada Desa Tangguh Bencana lebih menekankan pada upaya peningkatan penanggulangan bencana berbasis komunitas. Hal ini terbukti pada organisasi pelaksana Kampung Siaga Bencana yang cenderung membentuk kelembagaan baru sedangkan Desa Tangguh Bencana bisa dibentuk lembaga baru atau mengembangkan dan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

Penelusuran awal peneliti menunjukkan bahwa mangrove yang ada di Rembang yang berada di Desa Pasar Banggi tingkat kerusakan sangat parah, apalagi saat ini kegiatan reklamasi hutan mangrove terus digalakkan dengan mengalih fungsikan kawasan hutan mangrove itu menjadi tambak, area industri, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah. (Purwowibowo & Gianawati, 2016).

Menurut (Purwowibowo & Gianawati, 2016); H. Suyadi adalah orang yang pertama kali mengetahui manfaat pohon mangrove untuk melindungi tanggul dari terjangan gelombang, dari situlah idenya muncul untuk melindungi tanggulnya secara permanen. Awalnya, semua ia kerjakan sendiri, tapi mengalami kegagalan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Akan tetapi, ia tidak putus asa dan mengajak tetangganya untuk menanam pohon mangrove. Usahanya tidak sia-sia, lambat laun hasil tanggulnya tidak tergerus gelombang. Akhirnya, gerakan penanaman pohon mangrove serempak terjadi, baik secara sendiri maupun serempak.

Berdasar tinjauan pustaka, belum ada penelitian yang mengambil study kasus *Proses Collaborative Governance* Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi

Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi. Relevansi penelitian terdahulu bagi penulis adalah sebagai bahan pemahaman tentang program bencana secara umum, faktor kunci keberhasilan dalam mencegah bencana abrasi dalam pelaksanaan proses *collaborative governance*.

B. *Collaborative Governance*

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Gash "Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods" Ansell dan Gash, (2007). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*.

Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Proses *collaborative governance* melalui beberapa tahapan. Morse and Stephens (2012) membagi tahapan *collaborative governance* ke dalam 4 tahapan, yaitu:

1. *Assesment* (Penilaian)
2. *Initiation* (Inisiasi)
3. *Deliberation* (Musyawarah)
4. *Implementation* (Implementasi)

Morse & Stephen dalam *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning* menjelaskan, bahwa tahap pertama dari *collaborative governance* adalah *assessment*. Tahap ini berkaitan dengan kondisi awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kemitraan antara *stakeholder*. Selain itu, tahap ini akan memberikan penilaian apakah kolaborasi diperlukan dan apakah kolaborasi memungkinkan untuk dilaksanakan. Tahap ini meliputi:

1. Faktor pemahaman kontekstual seperti sejarah kerjasama dan insentif kelembagaan atau kendala,
2. Mengidentifikasi pemangku kepentingan,
3. Kesepakatan umum tentang masalah, atau rasa tujuan bersama), dan
4. Rasa urgensi atau komitmen melaksanakan kolaborasi untuk menciptakan solusi Morse & Stephen,(2012)

initiation dimana setelah jelas bahwa diperlukannya suatu kolaborasi, maka tahap ini akan dilaksanakan dengan melibatkan, antara lain:

“mengidentifikasi convener dan peran sponsor yang mungkin akan menjadi sumber daya manusia dan sumber dana; dan mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kelompok kerja dalam process design”. Tahap initiation menekankan “*soft skill*” untuk mengadakan, membangun hubungan dan membangun sebuah tim.

Setelah memulai proses dengan kelompok kerja dan mendapatkan komitmen untuk bekerja sama, deliberation pun dilaksanakan. Berikut tahap deliberation, yaitu: “menetapkan aturan dasar, musyawarah dan dialog antara stakeholder sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan; dan mencapai perjanjian kerjasama” Morse & Stephen, (2012).

Setelah para *stakeholder* dengan kemitraannya memutuskan hasil dan strategi, *collaborative governance* bergerak implementation. Dalam tahap implementation diperlukan beberapa komponen yang akan mendukung, antara lain: “perancangan struktur pemerintahan, mendukung daerah yang dipilih atau menemukan “pemenangan” lainnya, monitoring perjanjian dan komitmen kerjasama, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan” Morse & Stephen, (2012)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator proses *collaborative governance* dari Anshell dan Gash (2007) yaitu:

1. *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka),
2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan),
3. *Commitment to Process* (Komitmen Bersama),

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama),
5. *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapai tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *collaborative governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance.

Definisi *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007) menyatakan : *A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, concensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.* (*Collaborative Governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset).

Dapat kita ketahui bersama bahwa kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena kenapa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama juga bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi, dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi Ansell dan Gash, (2007). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.

Pendapat di atas menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek, munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu

lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajemen salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Sebelum membahas terkait *collaborative governance* lebih dalam lagi, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai *governance*. Pengertian *governance* dirasa perlu jelaskan karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *collaborative governance*. Hal ini diupayakan agar dapat menemui pemaknaan yang lebih konkrit dan tidak terjadi kekeliruan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam aspek studi mengenai Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam

penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah.

Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata *“govern”* dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Dwiyanto, (2011)). Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

Menurut Chema dalam Keban (2008), *governance* merupakan suatu system nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Sementara Ulum dan Ngindana (2017) menyebutkan bahwa *governance* mengindikasikan ‘disesiminasi otoritas’ dari single actor menjadi multi-aktor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh actor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya *governance*

menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik.

Abidin dkk (2013) memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, melainkan memerlukan aktor lain di karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Sehubungan dengan keterlibatan multi aktor dalam *governance*, Stoker dalam (Ulum dan Ngindana, 2017) merumuskan parameter penerapan konsep *governance* yang dirangkumnya ke dalam 5 aspek sebagai berikut:

1. *Governance* mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah;
2. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatsi masalah sosial dan ekonomi;
3. *Governance* mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif;

4. *Governance* adalah mengenai jaringan aktor pemerintahan yang otonom;
5. *Governance* mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah.

Maka parameter diatas menjelaskan bahwa *governance* harus mampu mengandalkan pihak lain selain pemerintah. *Governance* mengharuskan adanya kinerja secara kolektif antar aktor. Sehingga jejaring anatar aktor tersebut diupayakan untu mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat di masyarakat, seperti permasalahan sosial dan ekonomi.

Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan atau relasi antara organisasi pemerintah dengan masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai adalah teori *collaborative governance* atau kerja sama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Hal ini juga dijelaskan oleh O'Flynn dan Wanna (2008) mengartikan bahwa kolaborasi atau *collaborative governance* adalah bentuk kerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerja sama demi kepentingan bersama dan memiliki ketentuan, syarat, dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi.

Terkait dengan teori kolaborasi atau *collaborative governance*, Emorson (2011) mengemukakan bahwa proses dan struktur dari pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan

bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan sendiri. Sementara (Mc Guire, 2006) menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* adalah konsep yang di dalam *management* pemerintahan sebagai proses fasilitator dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta dengan bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja.

Perspektif kolaborasi atau *collaborative governance* ini juga dikemukakan oleh (Chris Ansell dan Alison Gash, 2008) bahwa yang dimaksud dengan kolaborasi atau *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintah, yang dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor diluar pemerintahan (baik masyarakat, komunitas, swasta, dan *private sector*) dalam proses pengambilan keputusan secara formal dan non formal yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama.

Dari ilustrasi beberapa definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu paradigma baru dalam pemerintahan, yang dimana masyarakat, *sector business*, dan *stakeholder* lainnya yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum. Orientasi dari pelibatan tersebut merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak. Sehingga orientasinya adalah keberhasilan dari kebijakan tersebut sesuai dengan cita-cita

dan tujuan bersama. Sekalipun idealnya inisiatif dari kerja sama tersebut datang dari pemerintah.

Selanjutnya menurut (Ratner, 2012) yang mengemukakan bahwa didalam *collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yaitu:

1 *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada tahap ini pemerintah dan *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan.

2 *Debating Strategies for Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini, *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama.

3 *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan.

Adapun kriteria keberhasilan teori kolaborasi dalam *governance* yang di kemukakan oleh (Goldsmith dan Donald, 2009) yaitu :

1. *Networked Structure*

Networked Structure merupakan suatu keterkaitan antara satu elemen dengan satu elemen yang lain secara bersama-sama mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintah kolaborasi, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaborasi, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose*

Commitment to a Common Purpose merupakan alasan mengapa sebuah tujuan ini biasanya terdapat misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintahan kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Trust Among The Participants*

Trust Among the Participan merupakan hubungan professional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholder atau pemangku

kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap *stakeholder* harus saling percaya karna sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance*

Governance merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor *governance* atau pemerintah. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

5. *Access to Authority*

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing *stakeholder* untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability / Responsibility*

Distributive Accountability / Responsibility merupakan penataan pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. jadi, dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian

tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing *stakeholder* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

7 *Information Sharing*

Information Sharing merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy*, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi semua pihak, dan kemudian akses informasi bisa didapatkan bagi masing-masing *stakeholder*.

8 *Access to Resources*

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

C. Model Kolaborasi

Kolaborasi dibutuhkan seiring dengan munculnya interdependensi antara aktor atau organisasi. Semakin besar interdependensi antara aktor atau organisasi, baik secara *vertical* ataupun *horizontal*, maka semakin besar kebutuhan untuk berkolaborasi. Interdependensi kemudian mendorong meningkatnya frekuensi dan intensitas kemudian antara organisasi yang dijawab dengan keputusan dan tindakan yang dibuat bersama dan dikerjakan secara kolektif.

Untuk memetakan interpendensi tersebut, model kolaborasi merupakan suatu citra mental yang mencoba menyederhanakan kompleksitas relasi dan interaksi antara organisasi. Dalam penyederhanaan tersebut diidentifikasi sejumlah dimensi yang membentuk relasi dan interaksi tersebut. Adapun model-model teoritis kolaborasi yaitu : model Ansen and Gash, Model Agranoff-Mc Guire, Model Burrier-Coleman, Model Weber et.al.

1. Model Ansell and Gash

Model ini memiliki empat variabel yang di jadikan pusat perhatian yaitu : kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil menjadi sub-sub variabel. Untuk variabel proses kolaborasi, merupakan inti dari model ini, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi

2. Model Agranof-Mc Guire

Model ini didasarkan pada dua dimensi yaitu : aktifitas dan strategi. Kedua dimensi ini menghasilkan enam kombinasi model kolaborasi yaitu :

a. *Jurisdiction-Based Model*

Model ini dicirikan dengan aktivitas kolaborasi yang aktif (dimensi vertikal) dan strategi kolaborasi yang bersifat oportunistik (dimensi horisontal). Dimensi lain sebagai dari

pekerjaannya sendiri. Sedangkan horizontal menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan pengaturan (*governance*). Dalam aransemen tersebut tidak seorangpun memiliki power untuk menentukan strategi organisasi lain karena masing-masing memiliki kebijakan, strategi dan operasional tersendiri.

b. *Abstinence Model*

Model ini merupakan titik ekstrim dari *jurisdiction-based* model berupa ketidakmauan (*abstain*) untuk melakukan kolaborasi dan memilih tidak terlibat dalam berbagai program.

c. *Top-Down Model*

Model ini merupakan control pemerintah pusat secara vertikal terhadap pemerintahan regional dan local. Dalam model ini muncul dilemma yaitu bagaimana mewujudkan program nasional pemerintah melalui pemerintah local yang secara hukum bersifat independen.

d. *Donr-Recipient Model*

Model ini merupakan model moderat yang didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah actor menguasai informasi dan keahlian untuk mengontrol kebijakan yang konsisten dengan kepentingan social yang banyak. Model ini melibatkan grantros dan grante karen aktor-aktor dalam sistem kolaborasi. Selain tergantung pada yang lainnya. Ciri-ciri uatam model ini adalah kolaborasi vertical-horizontal yang minimal.

e. *Reactive Model*

Model ini dicirikan dengan tidak adanya orientasi yang dominan dalam strategi atau aktivitas kolaborasi dan pendekatan yang digunakan adalah maybe.

f. *Ccontented Model*

Model ini lebih menekankan strategi kolaborasi dari pada aktivitas kolaborasi itu sendiri. Dengan kata lain, model ini bersifat oportunistik dan berupaya mengeksploitasi lingkungan sesuai dengan preferensi pemerintahan lical atau organisasi itu sendiri

3. *Model Burrler-Coleman*

Buttler dan Coleman mengajukan model kolaborasi berdasarkan dimensi level interaksi dan dimensi ukuran kelompok. Berdasarkan paparan ini maka menghasilkan lima model yaitu: *library*, *solicitation*, *tim*, *community*, dan *process support*.

- a. *Model library* merupakan model kolaborasi yang paling sederhana dan paling umum yaitu interaksi orang dengan data khususnya suatu conten.
- b. *Model solicition*, model ini melibatkan permintaan dari kumpulan kecil requestor data dan sejumlah tanggapan dari responden
- c. *Model tim*, model ini digunakan untuk memfasilitasi aktifitas dari sebuah tim

d. *Model community*, merupakan kolaborasi yang kurang umum namun mapan. Digunakan untuk memfasilitasi aktifitas dalam sebuah komunitas.

e. *Model process support*, model kolaborasi ini menggunakan pemanfaatan teknologi kolaborasi dalam proses atau aliran kerja.

4. Model Weber et.al

Weber et.al mengemukakan bahwa kolaborasi yang berhasil menekankan integrasi berbagai fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi birokrasi, lintas arena kebijakan dan level pemerintahan serta mengikutsertakan warga masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam pemecahan masalah dalam proses implementasi.

Ada tiga dimensi yang dikemukakan oleh (weber et.al,2005) yaitu: dimensi vertikal, dimensi horizontal dan dimensi *parinership linkage*. Dimensi vertikal mencerminkan relasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga warga Negara dan organisasi non pemerintah lainnya dalam hubungan atas bawah. Dimensi horizontal mencerminkan relasi antara organisasi yang setara. *Partnership linkage* digambarkan sebagai *blending* (ramuan) relasi vertikal-horizontal sehingga menghasilkan suatu pengaturan yang efektif.

5. Model Kolaborasi Ann Marie Thomson dan James L. Perry

(Ann Marie Thomson dan James L. Perry,2006) yang melalui proses *collaboratine* dari negosiasi, komitmen dan pelaksanaan yang

dinaingi oleh *assessment*. Dimana dalam operasionalnya negosiasi berarti proses antara aktor yang akan terlibat di dalam *collaboration*. Setelah terjadi negosiasi maka akan muncul komitmen dari masing-masing aktor atas apa yang akan dilakukan di dalam kerja sama tersebut. Sementara proses pelaksanaan merupakan bentuk pengejawantahan dari komitmen bersama yang telah diambil melalui keterlibatan seluruh aktor dari antara aktor. Selain itu, untuk menjaga kerja sama perlu adanya *assessment* untuk melihat dari setiap proses yang ada tersebut, sejauh mana keaktifan dan keterlibatan masing-masing aktor.

D. Tujuan Melaksanakan *Collaborative Governance*

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. (Junaidi, 2015) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga

Pendapat di atas menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek, munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

E. Hambatan Collaborative Governance

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintah multiparntner yang melibatkan *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi *consensus*, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, namun *collaborative governance* tidak

hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat berupa *a way of behaving* (cara berperilaku/bersikap).

Menurut *Ggovernnce of Canada*, 2008 dalam Sudarmo, 2011 mengenai terhambatnya jalannya suatu kolaborasi (dalam juga partisipasi) adalah karena disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor-faktor budaya, faktor-faktor institusi-istitusi, dan faktor-faktor politik.

Budaya. Terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko. Untuk terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan public dan dengan demikian para pemimpinnya) untuk memiliki *skills* (keterampilan) dan kesediaan untuk masuk kemitra secara pragmatik, yakni berorientasi pada hasil. Memang memungkinkan mengabaikan konservasi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam kolaborasi, namun melakukan hal seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil resiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan.

Disamping itu, mengapa kolaborasi gagal adalah masih dipertahankannya pendekatan "*top dow*" oleh karena itu pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesempatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi, juga kolaborasi gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau *stakeholder* lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal

utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan/pihak pemerintah melalui pendekatan *top down* Sudarmo, (2009).

Institusi-institusi. Terkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut. Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah kebijakan juga bersifat vertikal, tidak cocok untuk kolaborasi karena mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasi secara horizontal antara pemerintah dan non pemerintah.

Bahkan betapun sebuah pemerintahan mengadopsi system pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat "*representative democracy*" belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalism yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal.

Dengan kata lain, kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas (yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak perlu meningkatkan proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai *standard opratin procedure* yang biasa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik), tidak biasa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan Negara demokrasi pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi

milik pemerintah) cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini menekankan pada responabilitas.

Politik. Terkait dengan faktor politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan diatas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Melalui ini untuk menggarisbawahi bahwa kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan bereluang menimbulkan konflik satu sama lain. melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terepresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan bisa diminimalisir.

Faktor lain yang bisa menjadi gaalnya sebuah kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal dikarenakan adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan muncul kepentingan baru yang berbedbeda diantara *stakeholder* termasuk para pemimpin masing-masing kelompok. Sudarmo, (2009).

F. Abrasi Pantai

1 Pengertian Abrasi

Sebelum kita membahas tentang bencana alam abrasi, penting kita ketahui bersama apakah bencana itu? Menurut undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.

Abrasi atau erosi adalah pengikisan. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi pantai merupakan salah satu bencana yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat khususnya yang berada di pesisir pantai. Abrasi pantai merupakan fenomena alam sehubungan dengan perubahan kenaikan permukaan air laut, iklim dan juga ekosistem yang sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang merusak dan mengakibatkan banyak permasalahan yang ada di wilayah pesisir pantai Desmond Ofosu Anim, (2013).

Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Gentur Handoyo, (2015) faktor-faktor penyebab perubahan garis pantai ada dua macam yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami gelombang arus, angin, sedimentasi, pasang surut, dll. Sedangkan faktor manusia meliputi

pengalihan, penimbung, reklamasi pantai, dll. Faktor abrasi bisa akibat dari faktor manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi faktor alam juga ikut menjadikan pengaruh terjadinya dampak abrasi, yang dimana faktor alam tidak dicegah untuk tidak terjadi, tetapi faktor manusia bisa untuk dicegah setidaknya untuk mengurangi akibat faktor-faktor abrasi.

Akibat dari abrasi pantai mengakibatkan hilangnya lahan pemukiman, lahan pertambakan dan mata pencaharian yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai seperti nelayan, petani dan petambak yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya alam, namun kondisi lingkungan dan sumberdaya alam pesisir pantai yang rentan tersebut berdampak pada aspek sosial ekonomi dan sosial budaya penduduk Damaywanti, (2013).



Gambar 2.1. Abrasi Pantai Akibat Hantaman Gelombang

Maksud dari gambar diatas, menggambarkan tentang proses terjadinya pengikisan abrasi pantai dari hantaman gelombang, pada saat badai datang dimana terjadi gelombang air laut. Hal ini dikarena gelombang dan angin, pantai dapat

mengalami abrasi atau erosi. Perhatikan pada gambar 2.1 (1) pada profil ini menerangkan bahwa belum terjadi abrasi pantai, (2) pada profil selanjutnya sudah mulai terjadi pengikisan pantai, (3) pada profil selanjutnya bentuk garis pantai sudah mulai terjal, (4) pada profil ini sudah sangat parah karena bentuknya sudah sangat terjal, dan akan terus menerus apa bila tidak mengantisipasi bencana tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa abrasi adalah suatu perubahan garis pantai yang berbeda dari semula dari garis pantai yang diakibatkan oleh aktivitas alam ataupun aktivitas manusia yang berdampak terhadap perubahan garis pantai.

2. Pengertian Pantai

Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang air tertinggi dan surut air terendah. Batas daerah daratan pada kawasan pantai adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan yang dimulai dari batas garis pasang tertinggi, sedangkan batas daerah lautan pada kawasan pantai merupakan daerah yang terletak dibawah dan diatas permukaan laut yang dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya Rahman, (2006).

Pantai merupakan gambaran nyata interaksi dinamis antara air, angin dan material (tanah). Angin dan air bergerak membawa material tanah dari satu tempat ke tempat lain, mengikis tanah dan kemudian mengendapkannya lagi di daerah lain secara terus-menerus. Dengan kejadian ini menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Dalam kondisi

normal, pantai selalu bisa menahan gelombang dan mempunyai pertahanan alami untuk melindungi diri dari serangan arus dan gelombang. Daerah pantai sering juga disebut daerah pesisir atau wilayah pesisir. Daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas kelautan Ramadhani, (2013).

Wilayah pantai ini telah membentuk suatu ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Selain itu wilayah pantai juga memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya Siaka, (2008).

Pantai secara umum diartikan sebagai batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Pantai merupakan daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air pasang surut terendah Ramadhani, (2013).

3 Dampak

Abrasi merupakan peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gerusan air laut. Gerusan ini terjadi karena permukaan air laut mengalami peningkatan. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan mencairnya es di daerah kutub akibat pemanasan global.

Menurut Muhammad Arsyad (2012) menyatakan: abrasi tentu sangat berdampak terhadap kehidupan. Pada umumnya abrasi lebih banyak memiliki dampak negative dibandingkan dampak positif. Dampak negatif yang dihasilkan dari abrasi juga sangat merugikan lingkungankhususnya

manusia. Berikut ini akan dipaparkan bukti bukti kerugian yang diakibatkan abrasi.

- 1) Air laut tidak pernah diam. Air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadangkecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besargelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal.
- 2) Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai.
- 3) Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.
- 4) Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.
- 5) Apabila pantai sudah mengalami abrasi, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Hal ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena secara otomatis devisa negara dari sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Selain itu, sarana pariwisata seperti hotel, restoran, dan juga kafe-kafe yang terdapat di areal pantai juga akan mengalami kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit.

6) Pemukiman penduduk yang berada di areal pantai akan kehilangan tempat tinggalnya akibat rumah mereka terkena dampak dari abrasi.

7) Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan luas pulau-pulau di Indonesia banyak yang akan berkurang dan banyak pulau yang akan tenggelam.

8) Dalam beberapa tahun terakhir garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan. Di beberapa daerah abrasi pantai dinilai belum pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, namun bila hal itu dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di daerah tersebut secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.

9) Pantai yang indah dan menjadi tujuan wisata menjadi rusak. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Tidak sedikit warga di pesisir pantai yang telah direlokasi gara-gara abrasi pantai ini.

Dampak abrasi yang sudah terjadi sangat sulit untuk dikembalikan kembali seperti semula. Dikarenakan tanah yang sudah terkikis oleh air atau ombak laut. Dampak ini juga akan mengakibatkan mata pencarian masyarakat seperti nelayan akan terganggu. Jika dampak ini tidak segera di

tanggulangi akan berakibat sangat parah untuk habitat perairan maupun masyarakat yang tinggal disekitar pinggiran pantai.

4 Cara mengatasi abrasi pantai

Perlu kita sadari bahwa masyarakat yang berada dipesisir harus mewaspadaai yang namanya bencana abrasi. Karna kita tidak tahu kapan bencana itu datang, untuk itu kita perlu mencegah atau mewaspadaai nya. Karna abrasi merupakan salah satu bencana alam yang dimana proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak dan abrasi biasanya disebut juga sebagai erosi pantai.

Karna kerusakan garis pantai mengakibatkan abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam didaerah pantai tersebut. Kemudian abrasi dikelompokkan menjadi bencana alam. Bencana ini terjadi karena faktor alam namun, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia bisa juga menjadi pemicu yang memperparah bencana abrasi tersebut.

Abrasi pantai yang disebabkan oleh ulah manusia, sebenarnya bisa diminimalisir bahkan dihindari dengan perubahan gaya hidup atau pun regulasi-regulasi yang sifatnya mengikat. Hal ini menjadi penting dan layak menjadi keprihatinan, karena kenapa bahwa bahaya atau kerugian yang disebabkan abrasi pantai bisa sangat besar dan mengenai ke hidupan manusia dan alam. Jadi, dengan melakukan tindakan pencegahan abrasi pantai, kita bisa menyelamatkan habitat perairan pantai. Jika masalah abrasi ini tidak segera ditanggulangi, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan luas pulau-pulau di Indonesia banyak yang akan berkurang

Maka dari itu kita juga bisa melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisir akibat dari abrasi, Sedia payung sebelum hujan. Setidaknya pepatah ini dapat kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya abrasi. Sebelum abrasi terjadi lebih parah, terdapat tindakan pencegahan yang mungkin dapat kita lakukan baik secara perseorangan atau berkelompok. Untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya abrasi pantai yaitu Ramadhan, (2013) diantaranya:

1. Pelestarian terumbu karang

Terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai, oleh karena itu perlu pelestarian terumbu karang dengan membuat peraturan untuk melindungi habitatnya. ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan vegetasi pantai lainnya merupakan pertahanan alami yang efektif mereduksi kecepatan dan energi gelombang laut sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. jika abrasi pantai terjadi pada pulau-pulau kecil yang berada di laut terbuka, maka proses penenggelaman pulau akan berlangsung lebih cepat.

2. Melestarikan tanaman bakau/*mangrove*

fungsi dari tanaman bakau yaitu untuk mengurangi akibat bencana tsunami, Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, untuk memecah gelombang yang menerjang pantai dan memperkokoh daratan pantai, selain mempertahankan

pantai, *mangrove* juga berfungsi sebagai tempat berkembangbiakan ikan dan kepiting.

3. Melarang penggalian pasir pantai

Pasir pantai yang terus menerus diambil akan mengurangi kekuatan pantai

4. Membangun Pemecah Gelombang

Guna untuk mengurangi dampak dari terjangkit ombak, tindakan ini juga disebut tindakan pencegahan secara teknis.

Dampak abrasi berasal dari faktor alam dan tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Tetapi jika sudah terjadi setidaknya manusia memberikan tanggungjawab dengan cara memberikan pencegahan ataupun tindakan untuk mengurangi dampak yang akan terjadi. Agar upaya ini dapat berjalan dengan lebih baik, maka peranan dari semua elemen sangatlah diperlukan. Apabila semua bisa kita lakukan yang seperti diatas, agar dampak abrasi tidak bertambah parah.

G. Kerangka pikir

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi kendala ataupun potensi yang ada, sehingga dapat merumuskan suatu Proses *Collaborative Governance*, sebagai cara untuk mengatasi atau setidaknya Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi dengan ini dapat memberikan harapan yang berkelanjutan demi kelangsungan ekosistem laut maupun untuk para generasi yang akan datang agar dapat merasakan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran rencana penelitian dengan alur sebagai berikut :



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan di kaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berkaitan dari rumusan masalah adalah *Collaborative Governance* Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai di Kabupaten Wakatobi, yang dimana fokus penelitian ini menfokuskan 5 indikator yaitu: *face to face dialog*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermedia outcome*.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam fokus penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Face to face dialog* (dialog/tatap muka)

Collaborative governance didasarkan pada *face to face* antara pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan fokus pada kerahmatamaan. Dialog secara langsung diperlukan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama.

Face to face adalah sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi tentang membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan merupakan fase terpisah dari dialog dan negosiasi hal yang substantif.

3. *Commitment to Process* (Komitmen Bersama),

Komitmen terkait motivasi berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Pemangku kepentingan ingin berpartisipasi untuk mengamankan legitimasi dalam memenuhi kewajiban hukum. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan tawar menawar itikad baik untuk saling menguntungkan cara terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan kesediaan untuk melaksanakan musyawarah.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama),

Pemahaman atas keputusan bersama menyiratkan persetujuan definisi masalah berarti persetujuan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengembangan pemahaman atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses kolaboratif dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi.

5. *Intermedite outcome* (Pencapaian hasil).

Kolaborasi mungkin terjadi ketika tujuan dan keunggulan kolaborasi relatif konkret. Pemangku kepentingan tidak bisa mengantisipasi keuntungan hasil dari kolaborasi. Pencarian fakta dan gabungan adalah jenis hasil sementara. Memperoleh keuntungan hasil dari kolaborasi bukan sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan ambis dalam pencapaian keberhasilan kolaborasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Proses *Collaborasi Governance* Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi maka jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu sudah penelitian kualitatif yang berusaha untuk menemukan makna, menyelidiki proses, individu maupun kelompok, situasi dan mencari tau dinas apa saja yang turut berpartisipasi dalam study kasus ini.

Tipe penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu tipe penelitian yang melakukan penggambaran tentang situasi atau kejadian, hal ini didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa informasi dari informan apa adanya dan sesuai dengan penelitian.

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007) men definisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-dat penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan sbtantif

dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Numana Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. Dipilihnya lokasi tersebut karena adanya kesesuaian karakteristiknya dengan judul, latar belakang permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.

Alasan lain peneliti memilih lokasi ini adalah karena lokasi tersebut menarik untuk diteliti dan melihat seberapa jauh pemahaman atau persepsi masyarakat tentang menjaga kelestarian pesisir pantai, baik itu hutan *mangrove* dan pasir pantainya. Kemudian seberapa tinggi tingkat *Collaborative Governance* dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai di daerah tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber penelitian primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses *collaborasi governance* dalam mencegah terjadinya abrasi pantai serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi skripsi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa buku, jurnal, atau berbagai bentuk terbitan secara periodik yang diterbitkan oleh organisasi atau instansi tertentu yang dapat mendukung data primer

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi penelitian, dalam naskah atau sumber data. Dalam penelitian ini informasi secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Adapun yang menjadi sumber informasi dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1. Informan Peneliti

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Sofian	S	Kepala Resort Wangi-wangi Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1 orang
2.	Eka Wulandari	EW	Kaur. Umum Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1 orang
3.	Sam Arisal, S.Sos	SA	Kaur. Umum Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1 orang
4.	Ruimu	R	Kepala Desa	1 orang
5.	Sam Arisal, S.Sos	SA	Kasi Pemerintahan Desa	1 orang
6.	La Herman	LH	Masyarakat	1 orang
7.	La Irmawan	LI	Masyarakat	1 orang
Total informan				7 orang

Sumber : Informan peneliti di Desa Numana Kabupaten Wakatobi

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut Moleong, (2010).

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang di gunakan untuk melengkapi data dalam rangkaian analisis masalah penelitian. Data ini menyangkut hasil

observasi yang di amati. Data ini biasa berbentuk buku-buku, majalah , gambar misalnya foto, dan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas satu penjelasan atau perkiraan peristiwa tersebut. dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data meliputi tiga komponen analisis yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif yang merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data, dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, disusen lebih sistematis, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data, agar dapat melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data lebih mudah kebenarannya dengan cara memperoleh

data itu dari sumber data lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapat merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Tahapan-tahapan dalam analisis data di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan lainnya.

G. Pengabsahan Data

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2014) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan waktu. Terdapat 3 (tiga) triangulasi menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

luas perairan (laut) $\pm 18.377 \text{ km}^2$ atau sebesar 97,00 persen dari luas Kabupaten Wakatobi. Atas dasar kondisi tersebut, maka potensi sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisata berbasis wisata laut/bahari menjadi sektor andalan di daerah Kabupaten Wakatobi. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km^2 (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibukota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa, yaitu seluas $45,50 \text{ km}^2$ (5,53%), selengkapnya disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan

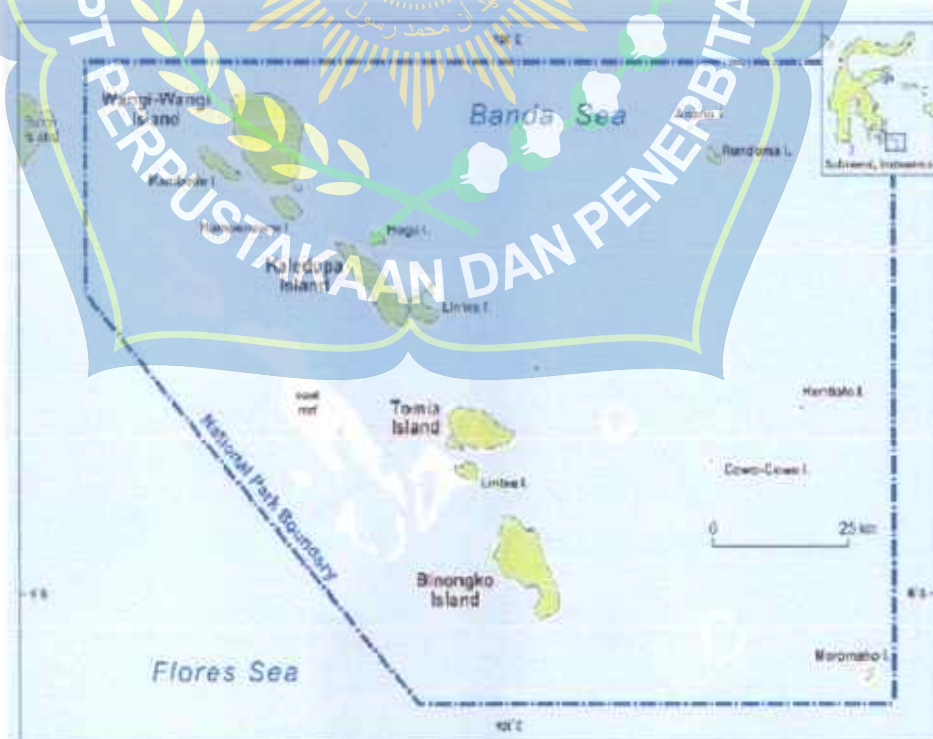
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah kelurahan	Luas Daratan (km^2)	Prosentase
1.	Wangi-wangi	14	6	241,98	29,40
2.	Wangi-wangi Selatan	18	3	206,02	25,03
3.	Kaledupa	12	4	45,50	5,53
4.	Kaledupa Selatan	10	-	58,50	7,11
5.	Tomia	8	2	47,10	5,72
6.	Tomia Timur	5	4	67,90	8,25
7.	Binongko	5	4	93,10	11,31
8.	Togo Binongko	3	2	62,90	7,64
Total		75	25	823,00	100,00

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2011

Kemudian, Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh beberapa perairan laut, diantaranya Buton, Laut Banda dan Laut Flores. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Wakatobi berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada



Gambar 4.1 Batas wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi

bersama atau berbagi pengertian agar tidak putus komunikasi atau informasi sehingga apabila ada keluhan dari masyarakat maka pihak pemerintah bekerja keras agar ekosistem laut maupun darat bisa dijaga dan melestarikan lingkungan agar terhindar dari oknum yang ingin merusak ekosistem laut maupun darat.

Hal serupa dengan wawancara dengan EK selalu Staf Pengendali Ekosistem Hutan sebagai berikut:

"Bahwa ketika terjadi masalah kami dari pihak kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila ada yang merusak Ekosistem laut maupun hutan maka dari pihak kami akan memberikan sanksi, misalnya menanam pohon mangrove dan membudidayakan terumbu karang. Karena kenapa agar masyarakat sadar bahwa dalam membangun kepercayaan untuk mengetahui dampak dari kerusakan yang masyarakat tersebut dapat memicu adanya abrasi pantai dan dapat berdampak sangat buruk, jika kita tidak bisa menjaga dan melindungi ekosistem lingkungan tersebut".(hasil wawancara penulis kepada EK, 28 September 2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dengan EK dapat disimpulkan bahwa hal ini dalam membangun kepercayaan dalam berkolaborasi sangat penting, karna agar masyarakat bisa paham tentang bahanya dari abrasi pantai tersebut apabila kita tidak menjaga dan tidak bisa merawat atau melindungi lingkungan maka cepat atau lambat kerusakan yang dibuat oleh ulah masyarakat akan datang, maka dari itu perlunya pahaman bersama.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat LI sebagai berikut:

“Dalam memahami sangat diperlukan dalam pelaksanaan menjaga dan melindungi lingkungan agar pihak bisa memahami tugas dan fungsinya, maksudnya agar segala pemangku kepentingan tahu bahwa dalam pelaksanaan tidak ada yang diuntungkan apalagi dirugikan tetapi semua pihak saling berkontribusi dalam bekerjasama sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan bersama agar bisa meminimalisir dampak abrasi tersebut”.(hasil wawancara penulis dengan masyarakat LI, 23 September 2020).

Dalam hasil wawancara penulis diatas oleh S bahwa dapat disimpulkan bahwa sikap saling memahami dalam pelaksanaan program sangat diperlukan agar semua pihak mampu memahami tugas dan fungsinya masing-masing dalam hal ini agar bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama agar bisa meminimalisir terjadinya dampak dari abrasi pantai.

5. *Intermediate Outcome* (pencapaian hasil)

Penerapan indikator kolaborasi mengenai pencapaian hasil, ini maksudnya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan sehingga dapat kembali pada kondisi yang semula yang dapat dilakukan tindakan-tindakan tertentu salah satunya dengan tindakan pembersihan agar dampak dari abrasi pantai bisa diminimalisir dampak kerusakan kepada masyarakat pesisir.

Berikut ini hasil kutipan wawancara dari S selaku kepala resort wangi-wangi sebagai berikut :

“Sebenarnya untuk melakukan tindakan dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak abrasi itu merupakan kewajiban bagi masyarakat yang biasanya lalai dalam memanfaatkan SDA itu sendiri, jadi kita kembalikan kepada masyarakat pesisir dalam tugas kami hanya mengarahkan dan

memberikan gambaran dari dampak abrasi apa bila terjadi".(hasil wawancara penulis dengan S, 28 September 2020).

Sehingga berdasarkan pemaparan yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga lingkungan yang paling berpengaruh itu masyarakat yang dimana masyarakat biasanya lalai dalam memanfaatkan SDA dan dalam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengarahakan dan memberikan wawasan bahwa dampak dari abrasi itu sangat beresiko fatal yang bisa merusak pemukiman secara permanen.

★ Berikut hasil wawancara penulis dengan EW selaku Penngendali Ekosistem hutan mengenai dalam pencapaian hasil sebagai berikut :

"Dalam menyikapi dan meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya abrasi tentu saja kita harus mengembalikan ekosistem seperti semula dengan menanam kembali mangrove apabila mangrove dirusak, kebanyakan masyarakat mengambil untuk kayu bakar akan tetapi didesa numana ini masih aman-aman"(hasil wawancara penulis dengan EW, 28 September 2020).

Dalam hasil wawancara penulis dengan EW dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi sebelum terjadinya abrasi maka masyarakat bisa sadar dan memanfaatkan SDA dengan baik dan di Desa Numana masih aman-aman saja dalam memanfaatkan SDA.

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat LH sebagai berikut :

" Iya, dalam memanfaatkan SDA yang ada di Kabupaten Wakatobi ini khususnya di Desa Numana dalam mencari kebutuhan untuk kebutuhan kami itu kami selalu mencari dikebun, kan kami juga diberikan arahan untuk sebaik-baiknya kita perlu menjaga ekosistem yang ada dilaut atau pun dipesisir terkhususnya

mangrove karena manfaatnya sangat banyak untuk kami sebagai masyarakat".(hasil wawancara peneliti kepada LH, 23 September 2020)

Dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat LH dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan SDA yang ada di Desa Nuaman itu selalu mencari kekebun untuk kebutuhannya dan diberikan wawasan kepada pemerintah mengenai menjaga lingkungan dan memanfaatkan sebaik-baiknya baik dilaut maupun dipesisir.

C. Pembahasan

Adapun pembasan mengenai indikator Proses *Collaborative Governance* dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi. Dalam pembahasan kali ini mengenai proses *collaborasi governance* dalam wawancara pada beberapa informan. Dalam wawancara ini ada beberapa actor yang menjalankan *collaborative governance* diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini pada wawancara informan dan peneliti actor swasta tidak ada dalam wawancara dengan peneliti dikarenakan yang berkontribusi dalam penanganan terjadinya abrasi ini pemerintah dan masyarakat, jadi swasta tidak terdapat dalam wawancara kali ini.

Wakatobi adalah kumpulan dari beberapa pulau diantaranya pulau Wangi-wangi, pulau Kaledupa, pulau Tomia dan terakhir pulau Binongko dan pulau terakhir ini ada keistimewaanya yaitu pulau pandai besi. Wakatobi memiliki beberapa potensi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan salah satu diantaranya mempunyai terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya hingga sekarang serta biota-biota

lautnya banyak dan langkah. Wakatobi juga termasuk segitiga karang dunia.

Masyarakat di desa Numana yang terletak di pulau Wangi-wangi antusias masyarakat menjaga ekosistem laut maupun pesisir pantainya dengan Balai Taman Nasional Wakatobi. Maka dari itu apa bila laut dan pesisir pantai tidak di jaga kelestariannya maka akan berdampak pada ekosistem laut yang menimbulkan abrasi. Untuk itu agar ekosistem laut bisa terjaga maka perlu adanya *collaborative governance*. Di Desa Numana itu sendiri sebagian masyarakatnya ada yang berpapasan dengan air laut dan otomatis berpengaruh terjadi kerusakan yang signifikan. Di Desa tersebut dalam nilai sosialnya untuk membantu sesamanya ataupun pemerintah.

Oleh karena itu, kasus yang sering kita jumpai belakangan ini adalah masalah abrasi pantai yang semakin parah akibatnya. Karena abrasi pantai ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Pada pembahasan kali ini *collaborative governance* dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi tidak akan bisa berjalan apa bila dalam kegiatan tersebut masih saling ketergantungan, maka dari itu pentingnya berkolaborasi dalam meminimalisir kerusakan terjadi yang disebabkan abrasi pantai. Dalam penelitian ini menggunakan indikator proses *collaborative governance* dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di Desa Numana dari Ansehll dan Gash (2007) yaitu :

1. *Face to Face* (dialog/ tatap muka)

Pada indikator ini merupakan salah satu tahap kolaborasi yaitu dialog/tatap muka yang mana pada tahap ini merupakan satu tahapan yang sangat penting bagi keberlangsungan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses dialog tatap muka secara langsung artinya pertemuan atau di peradakannya pertemuan oleh pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dengan membicarakan atau berdiskusi untuk membahas mengenai suatu masalah secara individu atau kelompok, guna untuk mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan tujuan bersama yang akan dilakukan dalam proses *Collaborative Governance*.

Dalam dialog tatap muka mengenai bahayanya dampak dari abrasi pantai dapat kita ketahui dari indikator terdapat dari pernyataan dengan informan dalam dialog tatap muka salah satu hal yang sering dilakukan dalam pertemuan. Apa lagi membahas tentang bahayanya abrasi pantai dengan instansi yang mengenai masalah abrasi pantai yaitu dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar tingkat kewaspadaan masyarakat tetap terjaga dan dalam pertemuan dialog tatap muka ini juga dihadiri kantiernas, babinsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang kofisien untuk mengumpulkan *stakeholder* untuk mewaspadaai bahaya dari abrasi

pantai yang bertujuan untuk menjalin kerjasama pemerintah Desa Numana dengan instansi yang mengenai abrasi pantai.

Kemudian dalam pertemuan menyatakan bahwa pentingnya dilakukan pertemuan tata muka mengenai terkaitnya dalam hubungan kerjasama dan peranan masyarakat juga penting, terutama lokasi ini berpapasan laut dengan pemukiman, maka dari itu dalam menyadarkan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat agar memanfaatkan SDA sebaik-baiknya.

Dari dialog tatap muka dapat disimpulkan bahwa sejatinya sangat penting dalam *collaborative governance* yang dimana pertemuan adalah wadah untuk menyatukan sebuah pendapat, didalam sebuah musyawarah hal utamanya adalah sebuah pertemuan dimana dalam pertemuan itu membahas terkait tentang apa tujuan dari sebuah program dan langkah kedepannya.

2. *Trusy Building* (membangun kepercayaan)

Kolaboratif dalam membangun kepercayaan yaitu dapat dikatakan sebagai penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksana. Pada fungsi pelaksana ini lebih menekankan kepada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang yang terlibat, dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat menjadi kenyataan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi yang dingin dicapai

saling mempercayai dalam membangun kerjasama semua pihak yang berada dalam collaborative governance mempercayai antara masing-masing stakeholder untuk memberikan masukan agar berjalan sesuai keinginan.

Dalam membangun kepercayaan itu sangat penting artinya mereka harus tau bagaimana proses membangun kepercayaan antara stakeholder dengan memberikan pengarahannya mengenai abrasi dan dampaknya. Hal ini membangun kepercayaan antara pihak untuk melakukan kerjasama yang relevan guna untuk memiliki kepercayaan yang baik dari setiap yang melakukan kolaborasi karena jangan dianggap sepele karena ini juga termasuk bencana yang dampaknya sangat memprihatinkan yang menyebabkan kerusakan yang sangat parah.

Dalam proses Collaborative Governance untuk membangun kepercayaan sering melakukan komunikasi terhadap semua pihak agar kepercayaan semua pihak terjalin dan tidak ada keraguan didalamnya ketika didalam kerjasama ada keraguan didalamnya maka kolaborasi ini tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan akan berdampak kerusakan.

Dalam membangun kerjasama sangat diperlukan dalam penjagaan lingkungan yang rawan terkena abrasi, maka perlu adanya penanaman 1000 pohon mangrove dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan melibatkan masyarakat.

Karena manfaat mangrove sangat penting bagi pesisir dan fungsi dari mangrove untuk mengurangi laju arus laut dan juga berfungsi sebagai pemijahan hewan-hewan laut.

Berdasarkan dalam membangun kepercayaan dalam hubungan kerjasama itu penting akan tetapi apabila yang melakukan kerjasama dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tidak harmonis yang tidak saling percaya maka kerjasama tidak akan berjalan sesuai m

3. *Commitment to Process* (komitmen bersama)

Komitmen terhadap proses artinya setiap hal yang dikeluarkan dalam ruang lingkup *collaborative governance* itu berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus disepakati dan dipegang teguh sampai pencapaian hasil yang diinginkan. Adanya motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dan mempunyai sikap tanggung jawab dalam bekerja sama untuk mencegah resiko terjadinya abrasi pantai dan dapat berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat pesisir.

Dapat diketahui dalam membangun komitmen harus ditanamkan dalam prinsip *Collaborative Governance* baik itu dari awal maupun sampai dengan tahapan untuk menjaga agar tujuan dari sebuah program itu dapat tercapai sesuai dengan matangnya persiapan, perencanaan dan pelaksanaan menjadi sebuah prinsip utama agar dalam berkomitmen setiap *stakeholder* bersungguh

agar mencapai tujuan yg diinginkan agar dampak dari abrasi pantai bisa diminimalisir.

Dari hasil wawan cara peneliti dengan informan bahwa bentuk komitmen dari Kepala Desa Numana sendiri dalam komitmen untuk meningkatkan kenyamanan dari kerusakan yang menyebabkan air laut menjadi tercemar bersungguh-sungguh untuk menghimbau agar masyarakat bisa menjaga dan melindungi lingkungan agar bisa nyaman dan lebih aman dari dampak abrasi agar dampak dari abrasi tidak terlalu parah.

Dari berbagai pihak dalam sebuah proses *collaborative governance* harus ada prinsip masing-masing pihak mampu bertanggung jawab terhadap tugas atau peran yang mana semua pihak dalam proses *collaborative governance* mau berkomitmen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar dalam mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Karena berkomitmen terhadap sebuah kerjasama bukanlah hal yang sangat muda, perlu adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap menjaga lingkungan agar pihak yang terlibat dapat berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.

4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Berbagi pengertian adalah proses saling berbagi pemahaman dalam berkolaborasi kerjasama mengenai apa yang

dapat mereka capai sebagai misi bersama dan tujuan bersama. Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup system *Collaborative Governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara bersama dalam mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu abrasi pantai. Oleh sebab itu untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi sehingga berdampak pada kualitas lingkungan serta berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dalam pemahaman bersama ini harus mempunyai sikap saling memahami dalam system kolaborasi yang mana dalam setiap lembaga yang ada dalam ruang lingkup system kolaborasi dapat diperlukan pemahaman akan keterbatasan dimiliki oleh pemerintah oleh karena itu maka diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini agar mampu memahami sehingga kolaborasi itu berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah dan masyarakat yang terlibat itu agar mampu memahami dengan baik sehingga tujuan itu bisa dicapai dengan baik. Sikap saling memahami sangatlah diperlukan agar mampu untuk menutupi keterbatasan dan kekurangan.

5. *Intermedia Outcome* (pencapaian hasil)

Penerapakan indicator kolaborasi mengenai pencapaian hasil, ini maksudnya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan sehingga dapat kembali pada kondisi yang semula yang dapat dilakukan tindakan-tindakan tertentu salah satunya dengan tindakan pembersihan agar dampak dari abrasi pantai bisa diminimalisir dampak kerusakan kepada masyarakat pesisir.

Dalam pencapaian hasil dalam collaborative governance dalam mencegah terjadi abrasi pantai untuk melakukan tindakan dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak abrasi itu merupakan kewajiban bagi masyarakat yang biasanya lalai dalam memanfaatkan SDA itu sendiri, jadi kita kembalikan kepada masyarakat pesisir dalam tugas kami hanya mengarahkan dan memberikan gambaran dari dampak abrasi apa bila terjadi. bahwa dalam menjaga lingkungan yang paling berpengaruh itu masyarakat yang dimana masyarakat biasanya lalai dalam memanfaatkan SDA dan dalam Kementrian Lingkungn Hidup dan Kehutanan mengarahkan dan memberikan wawasan bahwa dampak dari abrasi itu sangat beresiko fatal yang bisa merusak pemukiman secara permanen.

Dalam menyikapi dan meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya abrasi tentu saja kita harus mengembalikan ekosistem seperti semula dengan menanam

kembali mangrove apabila mangrove dirusak, kebanyakan masyarakat mengambil untuk kayu bakar akan tetapi didesa numana ini masih aman-aman. Hal ini dalam menyikapi sebelum terjadinya abrasi maka masyarakat bisa sadar dan memanfaatkan SDA dengan baik dan di Desa Numana masih aman-aman saja dalam memanfaatkan SDA

Dari hasil penelitian diatas mengenai indikator diatas dari teori collaborative governance dari anshell dan gash (2007) sangatlah kofesien dalam kegiatan peneliti mengenai proses collaborative governance dalam mencegah terjadinya abrasi pantai di desa numana kecamatan wangi-wangi kabupaten wakatobi. Hali ini banyak dampak yang diraskan masyarakat mengenai pengrusakan ekosistem alam yang tidak dimanfaatkan secara baik. Yang mana di desa tersebut susah mencari ikan maupun membudidaya rumput laut atas pengrusakan tersebut. Maka dari itu sebagian masyarakat gagal panen rumput laut atas pencemaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses *Collaborative Governace* dalam mencegah terjadinya abrasi di Desa Numana Kabupaten Wakatobi, yaitu : a) *Face to Face* atau dialog tatap muka berupa berdiskusi dan sosialisasi mengenai cara mencegah terjadinya abrasi pantai. b) membangun kepercayaan (*Trust Building*) meliputi menanam 1000 pohon bakau/ *mangrove*. c) komitmen terhadap proses (*Comitmen to Process*) berupa memberikan pelayanan siap siaga dan memberikan motivasi yang kuat dalam berpartisipasi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai d) pemahaman bersama (*Sharhed Understanding*) berupa diperlukan sikap memahami tugas masing-masing akan keterbatasan sehingga kolaborasi berjalan dengan baik dan e) pencapaian hasil (*Intermediate Outcome*) berupa dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penelitian mencoba memberikan saran atau masukan sebagai beriku :

1. Dalam pelaksanaan diharapkan pada pelaku stakeholder untuk bekerjasama dengan baik lagi agar kerusakan tidak berlanjut sampai kegenerasi yang akan datang.
2. Dalam pelaksanaan perlu meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder secara instensif melalui pemberian kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat serta

mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli terhadap permasalahan lingkungan sekitar.

3. Dalam pelaksanaan perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dengan membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hakam & B. Istijono, dkk. 2013. *Penanganan Abrasi Pantai di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan Mataram*, Mataram : Pusat Studi Bencana Universitas Andalas
- Abidin, Yunus. 2013. *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum* 2013. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agronaf and Mc Guire, 2003 *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 18, No.4 (Oct. 2008)
- Anshell and Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkley: University of California. Hlm.557-561
- Arsyad, Muhammad. *Kerusakan lingkungan pesisir pantai*, (Jakarta: 2013)
- Asell, Chris dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Jurnal of Public Administration Research and Theory Advance Access Published*. November 13, 2007.
- B. Triatmojo. *Teknik pantai*. Beta Offset, 1999. Yogyakarta. hlm. 397
- D.G. Bengen, *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor Bogor, 2001, Bogor, Indonesia, hlm. 48.
- Damaywanti, Kurnia. 2013. *Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di desa Bedono, Sayung, Demak)*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
- Desmond Ofofu Anim, P. N. N. a. N. M. D. 2013. *A rapid overview of coastal erosion in Ghana. International Journal of Scientific & Engineering Research*, 4(2), pp. 1 - 7.
- Donahune, J., Richard Z. 2011. *Collaborative Governance (Private Roles For Public Goals in Turbulent Times)*. Princeton University Pres; Princetion and Oxford.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Emerson, K. Nabatchi, T. Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- G Handoyo, AAD Suryoputro, P Subardj. 2015 *Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara. Jurnal Kelautan Tropis* 19 (1), 55-59
- Glodsmi S dan Donald F, K. 2009. *Unlocking The Power Of Networks: Keys To High Performance Government*. Brooking Institution Press: Wachington, D. C
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, *An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment*, Dalam *Anandarajan, Murugan (ed), e-Research Collaboration: Theory, Techniques and Challengers*. Hlm. 15-32. Heidelberg: Springer International Publishing.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wukorobi
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kustanti, A., B. Nugroho., D. Durusman., C. Kusmana., D. Nurrochmat., M. Krotti, dan C. Schusser. 2014. *Actor, interest and conflict in sustainable mangrove forest management - A Case from Indonesia*. *International journal of marine science* 2014. Vol.4 (16): 150-159
- Kustanti, A., B. Nugroho., D. Durusman., dan C. Kusmana. 2012. *Integrated management of mangroves ecosystem In Lampung Mangrove Center (LMC) East Lampung Regency, Indonesia*. *Journal of coastal development*. Vol.15 (2): 209-216.
- Mc Guire, M. 2006. *Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know it*. *Public Aministration Review*, Vol 66, Special Issue: Collaborative Public Management.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2009). *Teaching Collaborative Governance : Phases , Competencies, and Case-Based Learning*, 18(3), 565-584.
- Nawawi, Muhammad dan M. Saputro, Seno. 2010. *Analisis Abrasi pantai semarang bagian barat*. Tugas Akhir. Semarang: UNDIP.
- O'Flynn, J., dan Jhon W. 2008. *"Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia*. Australia: E Press

- Ramadhanni, R. F. (n.d.). 2013. *Implementasi Program Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR
- Realy, Jhon M. 2003. "Collaboration in Rural Devolepment; Critical Collaboration in State-NGO Partnership."
- Sudarmo. 2009. *Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan - Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance*. Jurnal Spirit Publik, Vol. 5, No. 2, hlm. 117-132, ISSN 1907-0489
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumbago Pranoto, *Prediksi Perubahan Garis Pantai Menggunakan Model Genesi dalam Jurnal Berkala Ilmiah Teknik Keairan* Vol. 13 No 3 – Juli 2007
- Thomas, Ann Marie and Miller, Ted. 2002. "Knowledge for Practice: The 2002 ARNOVA Conference. Montreal, Canada. Hal 14-16
- Thomos, A. M. & Perry, J. L. 2006. *Collaboration Processes: inside the Black Public Management*. Hal 20-30
- Ulum, M. Charenuh dan Rispa Ngindana, 2017. *Environmental governance Isu, Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003
- Weber, EP et al. 2005. "Collaborative Enforcement and Endangered Species; A Journal Society and Natural Resources, 18; 677-698

L



R

A

N



Foto pelestarian Ekosistem Mangrove



Foto dengan informan di Desa dan Mentri lingkungan Hidup dan Kehutanan

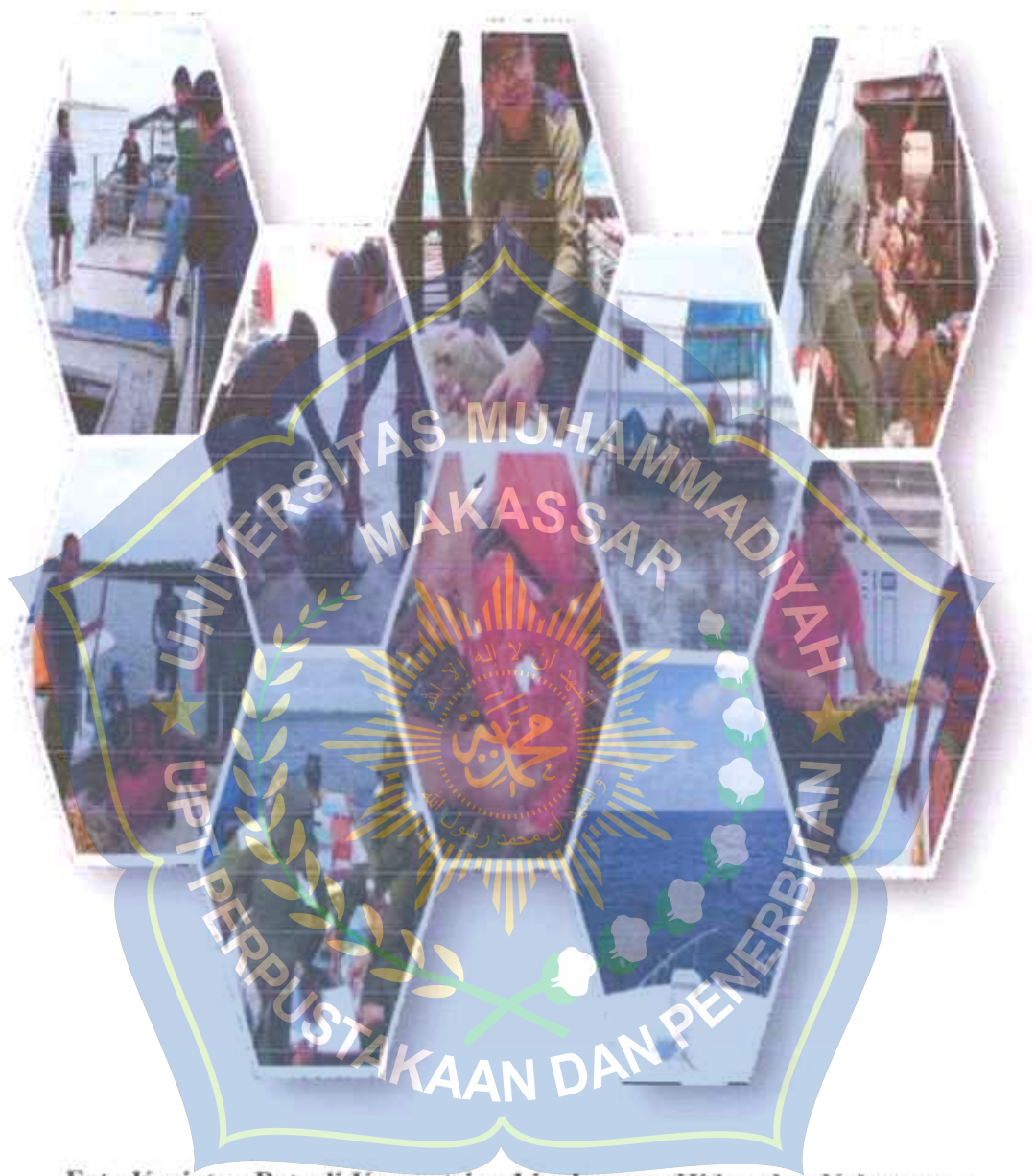


Foto Kegiatan Patroli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Aji Muhammad 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 556972, 551593, Fax. (0411) 555998



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama Halim Jaulani Alimudin

NIM 105611104616

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 30 Desember 2021

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinall S. Hum, M.P
NBM. 964 591



Submission date: 30-Dec-2021 11:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 1736384902

File name: BAB_I_halim_1.docx (22K)

Word count: 1552

Character count: 10388

Halim jauhari Alimin 105641104616 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	ejournal.uin-sorong.ac.id Internet Source	2%
4	shifadini.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude references





Submission date: 30-Dec-2021 11:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 1736384992

File name: BAB_II_halim_1.docx (406.05K)

Word count: 5513

Character count: 37015

Halim jauhari Alimin 105641104616 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	9%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	5%
3	nawarasyarif.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%
5	es.scribd.com Internet Source	2%
6	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
7	Repository.umy.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Submission date: 30-Dec-2021 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 1736385098

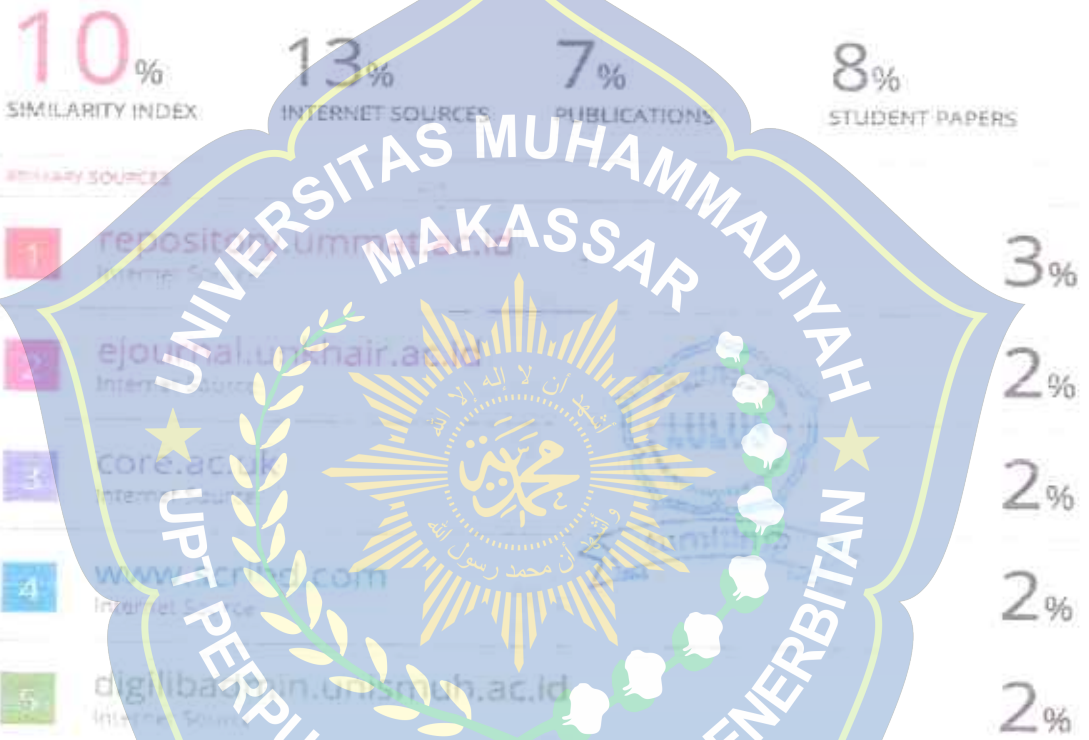
File name: BAB_III_halim_1.docx (24.18K)

Word count: 1098

Character count: 7174

Halim jauhari Alimin 105641104616 BAB III

ORIGINALITY REPORT



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches:



Submission date: 24-Dec-2021 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 1735397844

File name: BAB_IV_halim.docx (1.15M)

Word count: 9005

Character count: 57635

Halim jauhari Alimin 105641104616 BAB IV

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude references



Submission date: 24-Dec-2021 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 1735397913

File name: BAB_V_halim.docx (17.8K)

Word count: 263

Character count: 1768

Halim jauhari Alimin 105641104616 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, Halim Jauhari Alimin nama panggilan Halim, Lahir Bontowa, 04 April 1994. Merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Alimin. B,S.Pd dan Ibu ST Jawiah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 18 Bontowa pada tahun 2001, dan tamat pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ketingkat menengah pertama di SMP Negeri 3 Wangi-wangi Selatan, pada tahun 2007 hingga tamat pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Wangi-wangi pada tahun 2010 dan mengambil Jurusan IPA hingga tamat sekolah tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan.

Berkat Rahmat Allah SWT, dengan iringan Do'a dari Ibu, saudara, hingga keluarga dan beserta sahabat dan orang tercinta, sehingga pada tahun 2022 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan **"Proses Collaborative Governance Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Antai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi.**

Selanjutnya Kabupaten Wakatobi saat pertama kali terbentuk, Wakatobi hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan saja yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia dan Kecamatan Binongko. Pada tahun 2005 Kabupaten Wakatobi membentuk beberapa kecamatan baru melalui Peraturan Daerah. Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Wakatobi bertambah menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu terbagi menjadi 100 desa dan kelurahan (25 kelurahan dan 75 desa).

Kemudian Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis. Kenapa demikian karena perairan laut Kabupaten Wakatobidilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat Indonesia. Kabupaten Wakatobi bukan hanya dijalui pelayaran kawasan Timur dan Barat saja dan juga berada pada kawasan yang sangat potensial karena diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores. Selanjutnya Kabupaten Wakatobi berada pada Pusat Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Tri-angle Center*) yang meliputi 6 negara, diantaranya : Indoneisa, Malaysia, Philipina, Papua New Gine, Solomom island, dan Timor Leste. Posisi Kabupaten Wakatobi pada



Gambar 4.2 Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Kita perlu mengetahui bersama bahwa Kabupaten Wakatobi merupakan gabungan dari beberapa pulau dan gugusan kepulauan yang berjumlah 39 pulau, terdiri dari 4 (empat) pulau besar, diantaranya Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan terakhir Pulau Binongko yang disebut dengan pulau tukang besi. Keempat pulau tersebut ini mudah terjangkau baik dan bisa dilalui 2 transportasi, yakni transportasi Laut dan Udara. Di Kabupaten Wakatobi 2 Bandara Udara, diantaranya Pulau Wangi-wangi terdapat Bandara Udara Matahora, Pelabuhan Laut Nasional Panggulu Belo dan jalur angkutan ferry ASDP Kamaru-wanci, dan dipulau Tomia juga tersedia Bandara Udara Maranggo. Pada Bandara Udara Maranggo khusus transportasi untuk wisatawan dari Bali dan Singapura. Kemudian transportasi laut antar pulau Kabupaten Wakatobi cukup lancar. Akses dari ibukota Kabupaten Wakatobi (Wangi-wangi) ke Pulau Kaledupa dan Binongko tersedia setiap harinya dengan armada kapal cepat (*speed boat*).

Corak Budaya Kabupaten Wakatobi diambil oleh masyarakat yang homogen tersebar di empat pulau Kabupaten Wakatobi, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Kebudayaan di keempat pulau tersebut juga hampir memiliki corak yang sama, misalnya tradisi Karia'a (kemeriahan) yang terdapat di empat pulau tersebut. Hal ini disebabkan karena pengaruh kebudayaan Islam yang masuk di Wakatobi.

Corak kebudayaan utama yang hidup dan berkembang didalam Kabupaten Wakatobi berasal dari Kebudayaan Buton. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada corak kebudayaan lain, karena masyarakat Wakatobi sejak dahulu dikenal sebagai pelayar-pelayar ulung yang merantau ke seluruh pelosok nusantara. Posisi geografis Wakatobi berada di jalur pelayaran dan perdagangan utama, khususnya jalur rempah. Salah satu corak kebudayaan yang hidup dan berkembang adalah corak kebudayaan Persia, Mongol, Mindanao, Melayu, Nusa Tenggara, Jawa, Makassar, Ambon, dan lain-lain.

Adat istiadat di masyarakat Kabupaten Wakatobi, secara garis besar ada dua adat istiadat yang berlaku yakni adat istiadat terkait dengan urusan hidup misalnya perkawinan, sunatan dan lain sebagainya; serta adat istiadat terkait dengan urusan kematian. Adat istiadat tersebut diantaranya adalah Karia', Lapambai/ Sasa, Poasa-asa Pohamba-hamba, Wakkadopidopi, Paislamu, Sombo dan lain sebagainya. Dikalangan masyarakat Kabupaten Wakatobi masih terdapat ritus-ritus yang masih dilaksanakan. Ritus di masyarakat Kabupaten Wakatobi sangat

menjungjung nilai kearifan lokal, hidup selaras dengan alam. Ritus tersebut diantaranya adalah *Bangka Mbule-Mbule*, *Haddad*, *Hekombi*, *Kabuenga*, *Padongka*, *Pesta Laut Bajo*, tradisi *ande- ande*, tradisi *duata bajo*, tradisi *hekansara*, tradisi *hekomba'a*, tradisi *heonitu'a*, tradisi *hesuwui daoka*, tradisi *lelempora*, tradisi *loloa*, tradisi *palimpali kapota* dan ritus lainnya.

Pengetahuan tradisional yang masih ada dan masih berkembang di Kabupaten Wakatobi meliputi kerajinan, busana/pakaian tradisional, metode pengetahuan/ pengobatan tradisional, makanan tradisional, minuman tradisional, dan kain tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut diantaranya adalah Kampuru, Belo, Silepe, Hepupu, pengobatan asam urat, pengobatan cacangan, pengobatan cacar air, pengobatan typus, pengobatan malaria, Soami, Luluta, Kambalu, Kambose, Koholeo, Sinole, Tikar, kain tenun, tikar dan lain sebagainya. Ragam bahasa di Kabupaten Wakatobi meliputi Bahasa Wakatobi, Bahasa Cia-Cia, dan Bahasa Bajo

Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.

Komoditi unggulan Kabupaten Wakatobi yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, dan Pala. Sub sektor

Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu. sub sektor jasa yaitu Pariwisata

2. Gambaran Umum Desa Numana

Desa Numana merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Didesa ini memiliki pemandangan laut yang indah dan luas Desa Numana $\pm$ 755 Ha serta jumlah dusun didesa numana 2 dusun. Kemudian batas wilayah desa numana Sebelah Utara : Desa Komala, Sebealah Sealatan : Desa Liya One Melangka, Sebelah Barat : Laut dan Sebelah Timur : Kelurahan Mandai III, Jadi dari pusat ke kecamatan $\pm$ 1,75 Km dan Jarak dari pusat Kabupaten $\pm$ 4,20 Km, kemudian status desa (Berdasarkan IDM 2020) statsnya Berkembang.

Jumlah penduduk desa numana laki-laki : 758 sedangkan perempuan : 788 dengan total penduduk keseluruhan 1.545 penduduk dan jumlah KK : 425 KK. Sarana Penunjang yang ada didesa numana diantaranya : PAU, SD, TPQ, Masjid, Puskesmas, dan Posyandu.

Sebelum kita menuju visi dan misi tersebut didesa numan. Desa Numana mempunyai Motto "NUMANA" dengan makna sebagai berikut :

- ❖ **Nyaman** yang bermakna untuk menciptakan Desa Numana yang nyaman, terkikis dari issue-issue negative sebagai sarang penyamun, sehingga pada masa mendatang kita berupaya untuk berbenah diri untuk menjaga Desa Melalui kegiatan gotong

royong menjaga keamanan lingkungan dalam Desa. Disilah kita membangun Pos keamana sekaligus sebagai pos informasi desa.

❖ **Unik** yang bermakna bahwa Desa Numana merupakan desa penyangga Kota Wangi-Wangi sebagai Ibukota Kabupaten Wakatobi yang menjadi kenyataannya telah terbangun berbagai Kantor Pemerintahan baik berskala Nasional seperti , Kantor Pos SAR, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Kantor Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kantor Imigrasi Wakatobi dan juga Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi seperti Kantor PPKAD, Kantor KORPRI, Gedung PKK Kab. Wakatobi, Yang lebih unik lagi Desa Numana juga menjadi Tumpuan pertama Masyarakat dari Kaledupa, Tomia dan Binongko , karena penempatan Pelabuhan antar pulau yang di tempatkan di Desa Numana termasuk Tempat Pelelangan Ikan.

❖ **Maju** dimaknai bahwa setiap Pemimpin akan selalu berpikir untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya oleh karena itu partisipasi aktif warga Desa dalam membangun sangat di harapkan untuk kemajuan yang di maksud. Olehnya itu Kritik, saran dan ide serta gagasan yang konstruktif sangat di harapkan dalam mencapai Visi Desa terlebih Visi Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

❖ **Asri** di maknai Aman, Sejuk, Rapi dan Indah. Sesuatu yang menjadi dambaan dan tujuan hidup baik dalam Rumah tangga

terlebih pada unit yang lebih besar baik Rumah tangga Desa, Daerah bahkan Nasional sekalipun. Hal ini juga yang menjadi bagian dari Visi Pariwisata yakni SAPTA PESONA. Dalam Kata ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh Warga Desa terutama oleh Ibu-Ibu PKK dan Dharma Wanita mulai dari Tingkat Dasa Wisma, Lingkungan maupun tingkat Desa.

❖ **Nuansa** di makna sebagai Arah, Tujuan, Background atau latar kebijakan Pembangunan Desa. Sehingga dalam setiap arah kebijakan baik pembangunan dan pemerintah selalu di iringi di barengi dengan sesuatu yang menyentuh rasa warga Desa.

❖ **Agama** mengandung maksud bahwa setiap arah kebijakan Pemerintahan dan pembangunan selalu berpijak pada nilai-nilai luhur Agama dan sudah tentu karena kita seratus persen beragama Islam maka keluhuran yang di maksud sesuai dengan nilai keluhuran Agama Islam.

Visi Dan Misi Desa Numana Kecamatan Wangi-wangi

Selatan Kabupaten Wakatobi

Visi

Adapun visi dari desa numana dimana merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan Terbangunnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Numana yang Nyaman, Unik, Maju, Asri dan Nuansa Agama.

Misi

Adapun misi Desa Numana sebagai perangkat daerah kabupaten Wakatobi dapat menjabarkan misi, maka dirumuskan misi pemerintah Desa Numana sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan memberikan kenyamanan bagi warga Masyarakat.
 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa.
 3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.
- 3. Program Kerja Desa Numana**
- a. Bidang pemerintahan**
 1. Membuat rancangan program pembangunan desa jangka panjang, menengah dan pendek
 2. Pengoptimalisasian tugas, wewenang serta fungsi struktural pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien.
 3. Pengoptimalisasian pendapatan desa sesuai kebutuhan masyarakat numana.
 - b. Bidang Pendidikan dan Keagamaan**
 1. Membantu mensukseskan Program Pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah dan buta aksara;

2. Mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana mesjid dan perangkatnya.
3. Membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu;

c. Bidang Perekonomian

1. Membuka seluas-luasnya kemitraan seajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat;
3. Bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk perbaikan jalan poros desa dan penerangan jalan secara berkala;

d. Bidang Sosial

1. Pengoptimalisasian Karang Taruna dan organisasi masyarakat lainnya sebagai kontrol sosial dan kaderisasi;
2. Mengupayakan pembangunan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada di desa Numana.
3. Menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti, dll;

e. Bidang Katibmas

1. Mengadakan Pos Keamanan dan Informasi Desa secara bertahap;

2. Mengadakan tenaga Kamtibmas Desa di setiap Pos Keamanan dan Informasi Desa secara bertahap.

3. Melaksanakan kerjasama terpadu dengan Babinkamtibmas dan Babinsa Desa serta aparat penegak hukum lainnya;

4. Gambaran Umum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekilas Tentang Taman Nasional Wakatobi

Berada di jantung segitiga karang dunia (*The Heart of Coral Triangle Centre*) sehingga kaya Kehati SDL, mis 590 jenis ikan dan 396 jenis karang. Sebagai perwakilan ekosistem wilayah ekologi perairan laut Banda-Flores. Letak di pertemuan Laut Banda dan Laut Flores, mempunyai luas kawasan 1.390.000 Hektar, secara geografis TNW terletak :

- 123015'00" -124045'00" Bujur Timur (BT)
- 05015'00" -06010'00" Lintang Selatan (LS)

Secara administrasi TNW berada di Kabupaten Wakatobi. Di dalamnya terdapat 8 kecamatan, 25 kelurahan dan 75 desa. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Laut Banda dan Kabupaten Buton
- Selatan : Laut Flores
- Timur : Laut Banda
- Barat : Laut Flores dan Kabupaten Buton

Visi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi

“ Taman Nasional Wakatobi Sebagai Destinasi Ekosistem Bahari Unggulan di Dunia ”

Misi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi

- Mempertahankan status kawasan yang telah ditata batas secara fisik baik batas kawasan maupun zonasinya, memiliki status hukum yang jelas, system pengelolaan yang mantap dan dinamis, memperoleh pengakuan dan dukungan baik dari pemerintah Kabupaten Wakatobi dan masyarakat
- Mempertahan keutuhan, kualitas dan daya dukung SDAHE kawasan TNW dan terjaminnya system penanganan limbah yang baik, yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi perikanan dan pariwisata bahari pada zona pemanfaatan dan kawasan disekitarnya dan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian kelautan serta terdali dan termanaatkannya potensi jasa lingkungan
- TNW dikelola oleh organisasi yang mantap yang memiliki SDM yang professional, sarpras yang memadai, system pengelolaan adaptif dan didukung pendanaan berkelanjutan

Kegiatan Balai Taman Nasional Wakatobi

➤ Patroli Pengamanan Kawasan

Kegiatan patrol yang dilakukan untuk memastikan tidak ada kegiatan ekstraksi sumberdaya yang tidak ramah lingkungan

➤ Patrol Bersama Masyarakat Mitra Polhut(MMP)

Kegiatan patroli yang melibatkan masyarakat sebagai penggunaan langsung sumberdaya untuk sam-sama menjaga kelestarian laut demi masa depan kita bersama

➤ **Monitoring Sumberdaya**

Malakukan kegiatan monitoring sumberdaya yang berhubungan dengan pengawetan sumberdaya alam

➤ **Peningkatan Kapasitas**

Bersama mitra melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat

➤ **Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat**

Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung pengelolaan kawasan

8 SUMBERDAYA PRIORITAS KONSERVASI

➤ **Mangrove**

Teridentifikasi 28 jenis mangrove di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Terdiri dari 20 jenis mangrove sejati dan 8 jenis mangrove ikutan. Luas tegakan mangrove di TNW sekitar

1.131 Ha. Dengan tegakan terluas terdapat dipulau kaledupa

➤ **Terumbu Karang**

Memiliki luas terumbu karang seluas 54.500 Ha. Memiliki 396 spesies karang Scleractinia hermatipic yang terbagi dalam 68 genus dan 15 famili. Satu tambahan sebanyak 10 sepesies dari

spesies karang keras non scleractinia atau ahermatipic dan 28 geneta karang lunak

➤ **Burung Pantai dan/atau Laut**

Teramati 74 jenis burung pantai

➤ **Lamun**

Dikawasan TN Wakatobi teridentifikasi 11 jenis lamun.

Didominasi oleh jenis *Thalassodendron ciliatum*.

➤ **Spawning Aggregation Sites (SPAGs)**

Teridentifikasi 590 jenis ikan di TN Wakatobi. Setidaknya terdapat 11 titik pengamatan pemijahan ikan target di TN wakatobi

➤ **Penyu**

Teridentifikasi 2 jenis penyu yang ada di kawasan TN Wakatobi yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu (*Eretmochelys imbricate*)

➤ **Cetacean**

Teridentifikasi 11 jenis cetacean di kawasan TNW. 11 jenis cetacean terdiri dari 6 jenis paus dan 5 jenis lumba-lumba

➤ **Ikan Ekonomis Penting**

Ikan tangkapan nelayan yang menjadi sasaran dipantai (herbivore fish), ikan karang dan ikan lau dalam (ikan pelagis). Termaksud dalam kategori monitoring (beberapa ikan karang) dan ikan pelagis (seperti tuna, cakalang)

Gambar 4.3 Struktur Organisasi



Sumber : Balai Taman Nasional Wakatobi

B. Proses Collaborative Governance Dalam Mencegah Abrasi Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi

Sranko dalam Sudarmo (2015) mengemukakan bahwa dalam *collaborative governance* terdapat institusi yang mendorong interaksi di antara aktor-aktor organisasi pemerintah dan aktor-aktor organisasi non pemerintah tanpa adanya dominasi dalam mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, dan metode implementasi. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral. Dalam *Collaboratife Governance* ada beberapa aspek yang harus di perhatikan untuk menunjang keberhasilan sebuah

program yaitu : *Face to face dialog* (Dialog tatap muka), *Trust Buildig*(membangun kepercayaan), *Comitmen to proses*(komitmen bersama), dan *Sharheedd Understanding*(sikap saling memahami)

Dalam kolaborasi tersebut diharapkan peran pemerintah daerah dan masyarakat bisa saling bersinergi dalam mencegah abrasi pantai. Maka dari itu proses dalam suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Dalam suatu tahapan model kolaborasi sangat penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratinsi sulit untuk dilaksanakan dikarenakan karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikutini hasil wawancara terkait tentang proses *Collaborative Governance* dalam mencegah abrasi pantai di desa numana kabupaten wakatobi diantaranya sebagai berikut :

1. *Face to face dialog* (dialog tatap muka)

Pada indikator ini merupakan salah satu tahap kolaborasi yaitu dialog/tatap muka yang mana pada tahap ini merupakan satu tahapan yang sangat penting bagi keberlangsungan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses dialog tatap muka secara langsung artinya pertemuan atau di peradakannya pertemuan oleh pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dengan membicarakan atau berdiskusi untuk membahas mengenai suatu masalah secara individu atau kelompok, guna untuk mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan tujuan bersama yang akan dilakukan dalam proses *Collaborative Governance*.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai *face to face dialog* tatap muka, bapak RM sebagai berikut :

"Dalam dialog tatap muka salah satu hal yang sering kita lakukan dalam pertemuan. Apa lagi membahas tentang bahayanya abrasi pantai dengan instansi yang mengenai masalah abrasi pantai yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar tingkat kewaspadaan masyarakat tetap terjaga dan dalam pertemuan dialog tatap muka ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat". (hasil wawancara dengan RM, 21 September 2020).

Dapat kita ketahui bahwa dari kutipan wawancara diatas dengan informan pemerintah bapak RM selaku dari kepala Desa dalam hal ini dengan dialog tatap muka mengenai bahanya dampak dari abrasi bagi masyarakat disekitar pesisir pantai atau laut selalu melaksanakan sosialisasi dengan Balai Taman Nasional Wakatobi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka agar tetap waspada

terhadap abrasi pantai dan menjaga lingkungan dan dihadiri juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat.

Disamping itu hal serupa oleh wawancara dengan Kasi pemerintahan AS sebagai berikut :

“Pertemuan atau dialog tatap muka merupakan hal yang penting yang dimana dalam pertemuan ini pertemuan ini nantinya melakukan sosialisasi dari pemerintah dan masyarakat kami ikutsertakan agar sosialisasi bisa berjalan lancar, dan kami mengundang beberapa instansi ikut serata. Dan ada pertemuan yang akan diadakan setiap bulanya dan ada di adakan setiap tahun dan pertemuan ini dihadiri dari pihak yang terkait dalam mencegah terjadinyaabrasi pantai. Ada pertemuan yang akan diadakan setiap bulanya dan ada di adakan setiap tahun dan pertemuan ini dihadiri dari pihak yang terkait dalam mencegah terjadinyaabrasi pantai” (hasil wawancara informan AS, 21 September 2020).

Dari kesimpulan kutipan wawancara dari informan AS diatas dalam hal dialog tatap muka ini menyatakan bahwa memang penting dilakukan terkait dalam suatu hubungan kerjasama dan peranan masyarakat juga penting, terutama lokasi ini berada di daerah pemukiman masyarakat berpapasan denga pantai, maka dari itu dalam menyadarkan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat agar memanfaatkan SDA sebaik-baiknya dan kegiatan dalam pertemuan ada setiap bulan dan tahun.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Balai Taman Nasional yang mengenai indikator tatap muka, bapak S selaku Kepala Resort wangi-wangi :

“Dalam dialog tatap muka kami dari kementrian sering melakukan pertemuan didesa dengan masyarakat memberikan pengetahuan dan bimbingan agar menjaga lingkungan dan merawatnya termasuk pohon mangrove agar tetap selalu dilindungi dan dimanfaatkan dan apa bila tidak menjaga lingkungan maka masyarakat yang akan rasakan dampak dari abrasi itu sendiri”.(hasil wawancara dengan S, 28 september 2020)

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh informan, dapat diketahui bahwa selama ini dalam pertemuan dalam dialog tatap muka itu selalu dipertemukan dalam dan menaruh harapan akan peran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat mendapatkan pengarahan kepada masyarakat untuk bisa menjaga dan melindungi ekosistem baik di darat maupun dilaut agar dampak yang dirasakan baik dan akan tetapi apa bila tidak bisa mengindahkan arahan dan masukan dari kementrian tersebut maka dampak yang merasakan itu dari masyarakat yang berada dipesisir pantai atau pemukiman yang dekat laut.

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh salah satu masyarakat diwawancara dengan IM mengenai indicator dialog tatap muka:

“Iya kami sering mendapat undangan untuk mengikuti rapat yang diadakan ditempat kantor desa dan kita juga sebagai masyarakat karena kita dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai pentingnya mencegah abrasi pantai apa lagi mengurangi kerusakan yang terjadi”. (hasil wawancara informan IM, 23 september 2020).

Dari pernyataan diatas tetntang dialog tatap muka dapat disimpulkan bahwa sejatinya sangat penting dalam *collaborative*

governance yang dimana pertemuan adalah wadah untuk menyatukan sebuah pendapat, didalam sebuah musyawarah hal utamanya adalah sebuah pertemuan dimana dalam pertemuan itu membahas terkait tentang apa tujuan dari sebuah program dan langkah kedepannya.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kolaboratif dalam membangun kepercayaan yaitu dapat dikatakan sebagai penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksana. Pada fungsi pelaksana ini lebih menekankan kepada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang yang terlibat, dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat menjadi kenyataan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi yang ingin dicapai saling mempercayai dalam membangun kerjasama semua pihak yang berada dalam *collaborative governance* mempercayai antara masing-masing *stakeholder* untuk memberikan masukan agar berjalan sesuai keinginan.

Berikut ini penulis dengan S selaku Kepala Resort Wangi-wangi terkait dengan membangun kepercayaan dalam *collaborative governance* diantaranya sebagai berikut :

"Saya kira dalam membangun kepercayaan itu sangat penting artinya mereka harus tau bagaimana proses membangun kepercayaan antara *stakeholder* dengan memberikan pengarahan mengenai abrasi, karena sudah terjadi abrasi di Wakatobi ini, maka dalam kerjasama ini kita melibatkan langsung masyarakat itu sendiri apa lagi ini menyangkut keselamatan manusia"(hasil wawancara S 28 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan diatas tersebut yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa mengenai collaborative untuk membangun kepercayaan itu sangatlah penting karena ini melibatkan para stakeholder. Dalam hal ini membangun kepercayaan antara pihak yang melakukan kerjasama maka yang relevan guna untuk memiliki kepercayaan yang baik dari setiap pihak yang melakukan kolaborasi karena abrasi jangan dianggap sepele karena ini juga termasuk bencana yang dampaknya sangat memprihatinkan maksudnya menyebabkan kerusakan.

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Kaur Umum mengenai membangun kepercayaan sebagai berikut:

"Hal ini dalam membangun kepercayaan sering komunikasi terhadap semua pihak yang terlibat terkhususnya masyarakat, dalam hal ini dilakukan agar kepercayaan dari semua pihak terjalin dan tidak ada keraguan didalamnya ketika ada keraguan maka dalam kolaborasi ini tidak akan terjadi dan akan berdampak kerusakan".(hasil wawancara dengan SA, 28 September 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan bapak S selaku Kaur Umum untuk tentang Proses Collaborative Governance dalam Pencegahan Abrasi Pantai di Desa Numana dalam hal ini membangun kepercayaan dalam program ini dengan menjalin komunikasi yang intens terhadap semua pihak, komunikasi dilakukan saling berkoordinasi terhadap semua pihak terkait dalam apa yang telah tercapai dan apa yang menjadi kendala dilapang dalam menjaga lingkungan agar tidak berdampak pada kerusakan.

Dan berikut wawancara penulis dengan S selaku kepala Resort

Wango-wangi mengenai membangun kepercayaan:

“Dalam membangun kepercayaan dalam kerjasama dalam mencegah abrasi itu dimana pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat dan Kementrian seluu mengadakan penanaman 1000 pohon mangrove di setiap pesisir maka dari itu kami selalu memberikan kepahaman agar menjaga dan merawat lingkungan itu penting”. (hasil wawancara dengan S, 28 September 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat

Berikut ini diperkuat wawancara dengan EK selaku Pengendali Ekosistem Hutan mengenai membangun kepercayaan :

“Iya membangun kepercayaan dalam sebuah kerjasama itu harus, contohnya jika setiap ada kegiatan maka ada konfirmasi serta penyampaian di Desa dan menyapaikan kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap abrasi pantai dan itu kami selalu memberikan pengarahannya bahwa apa bila kita talai dalam menjaga lingkungan dampaknya ada di masyarakat”.(hasil wawancara peneliti kepada EK, 28 september 2020).

Berdasarkan dari kutipan peneliti dengan wawancara diatas dapat simpulkan bahwa dalam membangun kepercayaan dalam hubungan kerjasama itu penting akan tetapi apabila yang melakukan kerjasama dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tidak harmonis yang tidak saling percaya maka kerjasama tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan maksudnya tidak berjalan baik.

Berikut wawancara penulis dengan R selaku Kepala Desa mengenai dimensi membangun kepercayaan sebagai berikut :

“Dalam hal membangun kepercayaan pentingnya dalam komunikasi terhadap pihak terlibat dalam sebuah program agar

tingkat kewaspadaan terhadap abrasi pantai ini bisa dimaksimalkan, hal ini dilakukan agar kepercayaan dari semua elemen *stakeholder* bisa berjalan lancar".(hasil wawancara dengan R, 21 september 2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal membangun kepercayaan tentang collaborative governance dalam mencegah terjadinya abrasi pantai dalam hal membangun ini menjalin komunikasi yang intens terhadap semua pihak, komunikasi yang saling berkordinasi terhadap semua pihak terkait dengan apa yang teralah tercapai dan hal apa yang menjadi kendala dilapangan, selain komunikasi melalui telepon atau juga komunikasi langsung kemasyarakat dengan turun langsung.

Sedangkan hasil wawancara dengan LH selaku masyarakat yang mengatakan bahwa:

"Membangun kepercayaan dalam kerjasama dengan pemerintah itu penting dan harus tegas dan transparan agar kami masyarakat bisa memahami dan kami bisa bantu, akan tetapi diDesa kami belum ada peraturan mengenai larangan dan sanksi bagi masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal buruk yang bisa saja dihasilkan dari pencemaran tersebut".(hasil wawancara dengan LH, 23 september 2020)

Dari hasil kuitpan wawancara diatas dapat disimplkan bahwa dalam kerjasama bersama pemerintah dan membangun kepercayaan itu sangatlah penting akan tetapi dalam peraturan mengenai larangan masih belum ada dan kadang masyarakat dalam memanfaatkan SDA yang akan berdampak buruk yang bisa saja dihasilkan memicunya terjadi abrasi pantai tersebut.

Dalam hal ini kegiatan yang membangun kepercayaan adalah cepat tanggap dalam menangani problema seperti adanya penggalian pasir secara ilegal yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan membuat air laut menjadi keruh dan kotor.

3. *Commitmen to Process*(komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap proses artinya setiap hal yang dikeluarkan dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* itu berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus disepakati dan dipegang teguh sampai pencapaian hasil yang di inginkan. Adanya motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dan mempunyai sikap tanggung jawab dalam bekerja sama untuk mencegah resiko terjadinya abrasi pantai dan dapat berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat pesisir

Berikut ini hasil dari kutipan wawancara dengan informan S selaku Ketua Resort Wangi-wangi sebagai berikut:

“Di dalam membangun berkomitmen untuk *bercollaborative* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak kenal kata menyerah dengan situasi dan kondisi apapun, pada intinya kami bertujuan memberikan pelayanan siap siaga dalam melakukan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan sesuai pedoman dalam visi misi”. (hasil wawancara dengan S, 28 September 2020)

Dari penjelasan diatas dengan S bahwa dapat kita ketahui komitmen dalam sebuah proses harus ada kepa demikian karena berkomitmen memberikan pelayanan itu dapat membuat program tersebut berjalan sesuai dengan visi misi dengan tidak kenal kata

menyerah dengan situasi dan kondisi apapun dengan bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat

Berikut wawancara penulis dengan EK selaku Staf Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai berikut:

“Bentuk komitmen terhadap dalam mencegah abrasi itu dengan seerius untuk menjalankan semua proses mulai dari tahapan persiapan, perencanaan serta pelaksanaan dan sehingga agar tujuannya supaya dapat tercapai yaitu mencegah terjadinya abrasi”. (hasil wawancara penulis dengan EK, 28 September 2020)

Dalam hasil wawancara dengan EK bahwa berkomitmen dalam sebuah program harus ditanamkan dalam prinsip *Collaborative Governance* baik itu dari awal maupun sampai dengan tahapan untuk menjaga agar tujuan dari sebuah program itu dapat tercapai sesuai dengan matangnya persiapan, perencanaan dan pelaksanaan menjadi sebuah prinsip utama agar dalam berkomitmen setiap stakeholder bersungguh mencapai tujuan yg diinginkan dari dampak abrasi pantai tersebut.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis kepada R selaku kepala Desa Numana sebagai berikut:

“Dalam berkomitmen untuk menguatkan kesadaran masyarakat agar wilayah kami bisa lebih nyaman dan lebih aman dari pengaruh abrasi, salah satu bentuk komitmen kami dengan betul-betul mengajarkan agar mari bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan agar kerusakan yang dibuar oleh masyarakat yang bisa menyebabkan abrasi pantai tidak berdampak buruk nantinya, maksudnya tidak begitu parah akan merusak pemukiman yang berada dekat dengan pantai”.(hasil wawancara penulis dengan R, 21 September 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk komitmen dari Kepala Desa Numana sendiri dalam meningkatkan keyakinan dari kerusakan yang menyebabkan air laut menjadi tercemar bersungguh-sungguh untuk menghimbau agar masyarakat bisa menjaga dan melindungi lingkungan agar bisa nyaman dan lebih aman dari dampak abrasi agardampak dari abrasi tidak terlalu parah.

Berikut ini wawancara penulis dengan AS selaku Kasi Pemerintahan sebagai berikut:

"Komitmen dari Pemerintah desa dalam penanganan dalam mencegah abrasi pantai semua aturan yang termuat dalam pedoman program dan petunjuk agar dalam pelaksanaan nantinya masyarakat bisa berkontribusi dalam menjaga dan melindungi ekosistem yang agar nantinya dampak yang disebabkan abrasi tidak parah kepemukiman".(hasil wawancara penulis kepada bapak AS, 21 September 2020).

Dari penjelasan diatas oleh AS selaku Kasi Pemerintahan dalam menjalankan semua aturan yang termuat dalam visi misi desa agar masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga melindungi ekosistem baik didarat maupun laut agar nantinya dampak dari abrasi pantai tidak mengakibatkan kerusakan parah sampai kepemukiman.

Berikut ini wawancara penulis dengan LH selaku masyarakat sebagai berikut:

"Kami dari pihak masyarakat ikut andil bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan,misalnya menjaga atau melindungi hutan mangrove,jangan menmbang pasir secara berlebihan, jangan membuang sampak dilaut dll. Agar terjadi abrasi tak terlalu parah

kepemukiman".(hasil wawancara dari masyarakat LH, 23 September 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal meyakinkan masyarakat agar senantiasa sadar bahwa sebelum terjadinya abrasi masyarakat harus mengantisipasi dan ikut andil dalam menjaga dan merawat lingkungan dari abrasi pantai. Bahwa sejatinya bahwa bencana muncul ada campur tangan manusia itu sendiri.

Dari hasil wawancara dari berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah *proses collaborative* harus ada prinsip masing-masing pihak mampu bertanggung jawab terhadap tugas atau peran yang mana semua pihak dalam *Proses Collaborative governance* mau berkomitmen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar dalam mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Karena berkomitmen terhadap sebuah kerjasama bukanlah hal yang sangat muda, perlu adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap menjaga lingkungan agar pihak yang terlibat dapat berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.

4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Berbagi pengertian adalah proses saling berbagi pemahaman dalam berkolaborasi kerjasama mengenai apa yang dapat mereka capai sebagai misi bersama dan tujuan bersama. Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup *system Collaborative Governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang

lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara bersama dalam mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu abrasi pantai. Oleh sebab itu untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi sehingga berdampak pada kualitas lingkungan serta berdampak pada kehidupan masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara penulis kepada S selaku Kepala Resort Wangi-wangi sebagai berikut:

"Dalam pemahaman bersama ini kita harus mempunyai sikap saling memahami dalam system kolaborasi, yang mana dalam setiap lembaga yang ada dalam ruang lingkup system kolaborasi diperlukan pemahaman akan keterbatasan dimiliki oleh pemerintah oleh karena itu maka diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini agar mampu memahami sehingga kolaborasi itu berjalan dengan baik" (hasil wawancara penulis kepada S, 28 September 2020)

Dari penjelasan diatas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi dapat disimpulkan bahwa didalam ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan, maka dari itu semua pihak harus mampu dan memahami keterbatasan yang dimiliki pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah yang terlibat itu dipahami agar mampu berjalan dengan baik sehingga tujuan itu bisa dicapai dengan baik. Sikap saling memahami sangatlah diperlukan agar mampu untuk menutupi keterbatasan dan kekurangan.

Hal serupa juga dari wawancara dengan AS selaku Kasi Pemerintah Desa Numana sebagai berikut:

“Iya, itu harus bahwa didalam kolaborasi ini kami dari pihak pemerintah desa berharap semua pihak-pihak *stakeholder* itu saling memahami tugas masing-masing, agar tidak saling bergantung untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing, tetapi saling menutupi kekurangan dari semua pihak”.(hasil wawancara dengan bapak AS, 21 September 2020).

Dalam pernyataan diatas oleh bapak AS selaku Kasi Pemerintahan Desa dapat disimpulkan tentang sikap saling memahami dalam suatu sistem atau ruang lingkup kolaborasi diperlukan sikap saling memahami antara pemerintah ataupun lembaga yang terkait agar kekurangan-kekurangan dalam sistem kolaborasi berjalan rencana sesuai tujuan bersama.

Berikut ini wawancara penulis dengan R selaku Kepala Desa sebagai berikut.

“Agar kepercayaan masyarakat tidak goyah atau kolaborasi dengan masyarakat tidak putus maka kami selalu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan bekerja keras dan tepat sehingga apa bila ada keluhan masyarakat, maka bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut, misalnya apa bila ada oknum yang ingin merusak ekosistem lingkungan terkhusus bagian laut maupun darat, seperti menebang pohon *mangrove* atau menggali pasir yang akan berdampak pada pencemaran laut, sehingga laut bisa keruh dan akan berdampak pada rumput laut masyarakat hasil budidaya masyarakat dan lain sebagainya”.(hasil wawancara penulis dengan R, 21 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dengan R dapat disimpulkan bahwa dalam berkolaborasi perlu adanya pemahaman